

LAPORAN KINERJA (LKj)



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusun Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanahkan bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja, yang merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran strategis (Renstra).

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan dalam tahun 2024. Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Satpol PP dan Damkar untuk masa mendatang.

Pelaihari, 14 Maret 2025
KEPALA SATUAN,

MUH.KUSRI, SP
NIP. 19690315 199803 1 012



DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar

Daftar Isi

Ikhtisar Eksekutif

Bab I Pendahuluan

1.	Latar Belakang.....	1
2.	Maksud dan Tujuan.....	3
3.	Dasar Hukum.....	3
4.	Cascading Kinerja/ Pohon Kinerja.....	5
5.	Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	17
6.	Isu Strategis Perangkat Daerah.....	35
7.	Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	38
8.	Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	54
9.	Sistematika Penyajian.....	56

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

1.	Tujuan, Sasaran Kabupaten.....	57
2.	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.....	57
3.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	59
4.	Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	66

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1.	Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	69
2.	Akuntabilitas Keuangan.....	99
	1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024.....	99
	2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program....	111

Bab IV Penutup

A.	Kesimpulan.....	121
B.	Strategi Peningkatan Kinerja.....	121

Lampiran

1. IKU
2. Perjanjian Kinerja
3. Pohon Kinerja
4. Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
5. Monev Renstra
6. Matrik Keselarasan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKj) menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2024 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis tahun 2024-2026 tercermin dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja.

Untuk tahun 2024 Satpol PP dan Damkar menetapkan 3 sasaran strategis, dengan 3 indikator. Selanjutnya dari sasaran dan indikator tersebut didukung dengan 3 program, 10 kegiatan dan 26 sub kegiatan.

Rata-rata Capaian Kinerja Kepala Satuan berdasarkan indikator kinerja dengan persentase penuntasan pelanggaran Perda dan Perkada serta penyelesaian gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum sebanyak 125 kasus dilaporkan dan sudah terselesaikan 125 kasus sehingga dianggap selesai 100%. Sedangkan untuk persentase penanganan kebakaran pemukiman 1.530 menit / 102 kejadian dan sudah terselesaikan sebanyak 102 kejadian dengan waktu 15 menit/ kejadian.

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2024 dapat memenuhi target sesuai yang diharapkan dengan pengembangan dan pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026 berorientasi pada sasaran meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta meningkatnya perlindungan masyarakat;

Untuk masa mendatang, kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tanah Laut akan terus ditingkatkan, dengan melakukan beberapa hal, antara lain:

1. Mengoptimalkan sumber daya manusia dari segi kuantitas (tambahan pegawai baru);
2. Mengikutsertakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis;
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik;

4. Mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi berkala atas hasil kegiatan
6. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN&RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi SAKIP. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Satpol PP dan Damkar.

Dalam mewujudkan hal tersebut dibentuklah aparat penegak peraturan daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 256, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah, Menyenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta Mengayomi Masyarakat.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap SKPD dalam rangka untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 2 menyebutkan bahwa dalam Kepala Daerah mendukung melaksanakan pelaksanaan tugasnya menegakkan Peraturan Daerah mengatur ketertiban dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di setiap Provinsi dan Kabupaten / Kota. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan daerah memiliki kontribusi yang sangat penting untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah dengan menciptakan pemerintahan yang baik dalam ranah penegakan peraturan daerah.

Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran utama dalam memberikan keamanan dan ketertiban di masyarakat, dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat bekerjasama dengan Polri dan TNI dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi, sehingga dapat terwujud kondisi yang didambakan oleh masyarakat.

Masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat pada dasarnya merupakan masalah yang sangat serius, apabila tidak dijaga dan dipelihara dengan baik maka akan menimbulkan masalah/problem di masyarakat. Penyebab permasalahan yang timbul diakibatkan oleh kurangnya pengawasan. Kondisi tersebut membuat peran dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran bersama Stakeholder harus proaktif. Sinergisitas bersama stakeholder perlu ditingkatkan sehingga terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan yang lainnya. Sinergi terjadi ketika berbagai bagian organisasi berinteraksi untuk menghasilkan efek gabungan yang lebih besar daripada efek masing-masing bagian sehingga masyarakat akan merasa aman dan nyaman selama beraktivitas sehari-hari.

2. Maksud Dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan Kinerja Satpol PP dan Damkar. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Peraturan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 313);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, Tanggal 30 Desember 2024;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

4. Cascading Kinerja

Matriks Cascading Kinerja berdasarkan RPJMD 2024-2026 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

**MATRIK CASCADING KINERJA BERDASARKAN RPJMD 2024-2026
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut aman	Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase penuntasan pelanggaran gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam satu (1) daerah kabupaten/ kota	Persentase penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Kabid Trantibum
						Sub Kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerntiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah laporan penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penerntiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	
						Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kabid SDA
						Sub kegiatan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	
						Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase penurunan pelanggaran Perda	Kabid Gakda

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada	
						Sub kegiatan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	
						Sub kegiatan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda/ Perkada kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ pelaku usaha	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kab/Kota	Persentase pembinaan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Kab/Kota	
						Sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	
		Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Kabid Damkar

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran, serta alat pelindung diri sesuai standar teknis terkait	
						Sub kegiatan pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	
						Sub kegiatan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah kabupaten/ kota	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	IKM Sekretariat Satpol PP dan Damkar	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris
						Sub kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	
						Sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	
						Sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
						Sub kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	
						Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
						Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Uruasan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinah Daerah	
						Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	

Tujuan	Indikator Tujuan	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		Penanggung Jawab
		Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Indikator	Kegiatan	Indikator	
						Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan di bayarkan pajak dan perizinannya	
						Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	
						Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara dan direhabilitasi	

5. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi

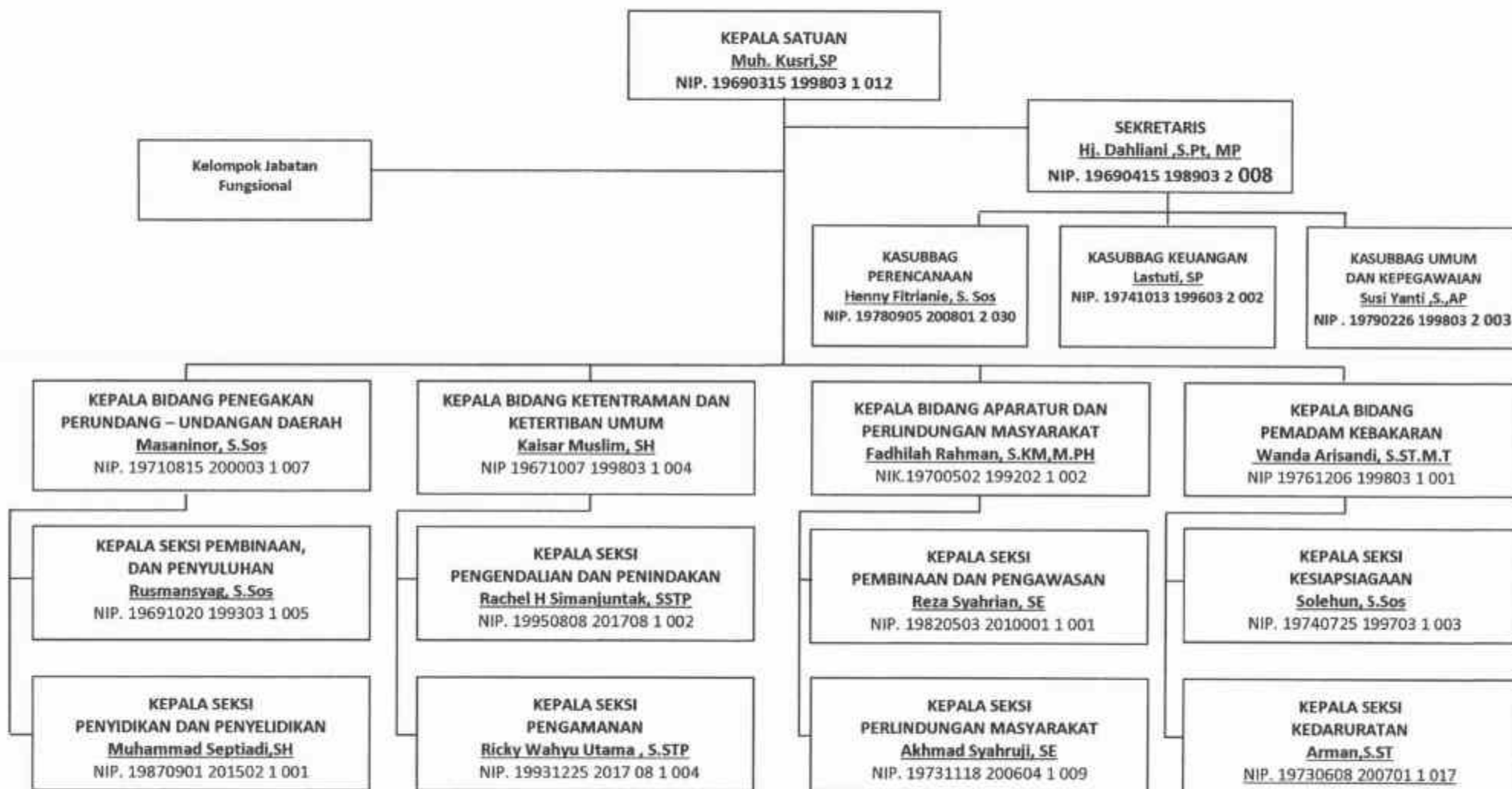
1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas:

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
2. Sekretaris;
 - 1) Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2) Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.
4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 1) Seksi Pengendalian dan Penindakan;
 - 2) Seksi Pengamanan.
5. Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2) Seksi Perlindungan Masyarakat.
6. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - 1) Seksi Kesiapsiagaan;
 - 2) Seksi Kedaruratan.
7. UPTD;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH LAUT



Untuk melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pembinaan UPTD dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai:

1. Uraian Tugas Kepala Satuan sebagai berikut:

Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan menetapkan perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, sumber daya aparatur, dan pemadam kebakaran;

- (1) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan penyuluhan, penyidikan dan penyelidikan penegakan perundang-undangan daerah;
- (2) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan penindakan, pengamanan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;

- (3) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan aparatur dan perlindungan masyarakat;
- (4) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan bidang kesiapsiagaan dan kedaruratan pemadam kebakaran;
- (5) Mengoordinasikan, membina dan mengawasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan dan / atau Keputusan Bupati, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) dan atau/aparatur lainnya;
- (6) Mengoordinasikan dan membina Kelompok Jabatan Fungsional;
- (7) Mengoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas UPT Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (8) Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan;
- (9) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Uraian tugas Sekretariat sebagai berikut:

- (1) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;

- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Perencanaan;
- (2) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (3) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (4) Menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- (5) Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- (6) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyampaian data dan statistik di bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
- (10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian tugas Sub Bagian Keuangan sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
- (2) Melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- (3) Melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- (4) Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- (5) Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- (6) Melaksanakan administrasi keuangan;
- (7) Melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- (8) Melaksanakan penyusunan laporan keuangan, laporan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (9) Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- (10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- (2) Melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- (3) Melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- (4) Melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- (5) Melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- (7) Menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- (8) Menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- (9) Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- (10) Melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- (11) Melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- (12) Melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- (13) Melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- (14) Melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- (15) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- (16) Melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- (17) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

6. Uraian tugas Bidang Penegakan Perundang – Undangan Daerah sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan daerah;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, dan memonitoring terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan perundang – undangan daerah;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

7. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan diatasnya;

- (3) Menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakkan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (4) Menyiapkan bahan dan menyusun bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pembinaan peraturan perundang-undangan dan penegakan peraturan produk hukum;
- (5) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan pelaksanaan produk hukum daerah;
- (7) Menyiapkan bahansosialisasi dan melaksanakan penyuluhan masyarakat tentang ketentuan produk hukum daerah terutama produk hukum yang memuat ketentuan pemberian sanksi apabila melanggar;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan tentang Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberian pemahaman terhadap tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

8. Uraian tugas Seksi Penyidikan dan Penyelidikan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyidikan dan penyelidikan;
- (2) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di atasnya;

- (3) Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas ditemukan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah, peraturan Bupati dan/atau keputusan Bupati sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- (4) Menyiapkan bahan hasil temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati yang akan diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- (5) Menyiapkan dan menganalisis bahan temuan atau patut diduga terjadinya tindak pidana kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia; mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan langkah pengembangan lebih lanjut;
- (6) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyidikan dan Penyelidikan;
- (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

9. Uraian tugas Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, membina pengawasan dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan dan mengembangkan kerjasama teknis dan operasional penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, menganalisa data-data, laporan – laporan dan peristiwa yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan patroli;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

10. Uraian tugas Seksi Pengendalian dan Penindakan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengendalian dan penindakan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan penindakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian dan penindakan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian dan penindakan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan, penertiban dan penindakan Non Yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- (9) Menyiapkan bahan dan menangani gangguan sesuai standar;
- (10) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengamanan;
- (11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

12. Uraian tugas Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang penegakan perundang – undangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Menyusun program, mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan aparatur, analisis dan penyusunan rencana kebutuhan personil, pendidikan, pelatihan dasar dan teknis fungsional serta pembinaan kesamaptaan;
- (4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi lainnya dalam hal pembinaan personil/aparatur;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menangkal ancaman dan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengorganisasikan penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang meliputi pengerahan, pengendalian dan pembinaan potensi dan latihan;
- (7) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aparatur dan perlindungan masyarakat;

- (8) Menyiapkan bahan pembinaan penyuluhan untuk meningkatkan ketaatan dan kepatuhan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- (9) Menyiapkan bahankoordinasi dan kerjasama dengan unsur keamanan dan ketertiban berupa deteksi dini dan upaya-upaya untuk mencegah timbulnya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan teknis operasional pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat, kesiagaan dan penyelamatan;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengendalian dan Penindakan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

11. Uraian tugas Seksi Pengamanan sebagai berikut :

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pengamanan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pengamanan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengamanan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengamanan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengamanan;
- (6) Menyiapkan bahan, melaksanakan dan mengevaluasi hubungan kerjasama teknis dan operasional dengan Instansi lain terkait pengamanan dan pengawalan pejabat dan kegiatan pemerintah serta penegakan hukum lainnya guna terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (7) Menyiapkan bahan dan membentuk Tim Patroli;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan Patroli;

- (8) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

13. Uraian tugas Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pembinaan dan pengawasan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bagi aparaturnya satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pelatihan dasar bagi aparaturnya satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (7) Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan pelatihan dasar bagi aparaturnya satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan di bidang pelatihan teknis fungsional bagi aparaturnya satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (10) Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparaturnya Penyisik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

14. Uraian tugas Seksi Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan masyarakat;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan perlindungan masyarakat;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta keamanan lingkungan;
- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kesiagaan dalam pencegahan ancaman dan gangguan;
- (8) Menyiapkan bahan, melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pengarah, pendidikan dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
- (9) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perlindungan Masyarakat;
- (10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya

15. Uraian tugas Bidang Pemadam Kebakaran sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis bidang pemadam kebakaran;
- (2) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pencegahan kebakaran;

- (3) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan metode, prasarana dan sarana kebakaran;
- (4) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi inspeksi peralatan proteksi kebakaran dan investigasi kejadian kebakaran;
- (5) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (6) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (7) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi Pembinaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (8) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan petugas pemadam kebakaran waktu tanggap kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (9) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan kebutuhan dasar korban kebakaran;
- (10) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelayanan pertolongan penyelamatan dan evakuasi korban jiwa, harta dan benda dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun;
- (12) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran;
- (13) Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

16. Uraian tugas Seksi Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- (1) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kesiapsiagaan;
- (2) Menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kesiapsiagaan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang kesiapsiagaan kebakaran dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
- (4) Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data kesiapsiagaan kebakaran;
- (5) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kesiapsiagaan kebakaran;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan sistem proteksi kebakaran;
- (7) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi pencegahan dan penyiagaan keandalan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran;
- (8) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi ancaman bahaya kebakaran;
- (9) Menyediakan pelatihan pemadaman kebakaran kepada masyarakat dan dunia usaha;
- (10) Membentuk sukarelawan pemadam kebakaran dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten;
- (11) Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembentukan satuan pelaksana pemadam kebakaran dipengelola gedung publik, pabrik/industri;
- (12) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan kepada Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar);

- (13) Menyiapkan bahan dan menyusun sistem ketahanan kebakaran pengelola bangunan gedung publik, pabrik/industri, perkebunan dan hutan;
- (14) Menyusun sistem ketahanan kebakaran lingkungan bagi masyarakat;
- (15) Menyusun pedoman peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- (16) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan rutin pemeriksaan peralatan proteksi kebakaran;
- (17) Menyediakan peralatan proteksi kebakaran diruang publik sesuai standar;
- (18) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan pencegahan dan pengendalian kebakaran kepada masyarakat;
- (19) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesiapsiagaan;
- (20) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

17. Uraian tugas Seksi Kedaruratan sebagai berikut:

- (1) Menyusun rencana kerja Seksi Kedaruratan;
- (2) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan kebakaran;
- (3) Menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kedaruratan kebakararan sesuai dengan ketentuan diatasnya;
- (4) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemadaman kebakaran secara tepat, akurat dan efisien;
- (5) Menyusun pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- (6) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan sistem, metode dan peralatan pemadaman kebakaran;

- (7) Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelamatan jiwa, harta dan benda penduduk dalam daerah Kabupaten;
- (8) Menyiapkan bahan, menganalisis, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan kebakaran untuk memperkecil korban dan kerugian harta benda akibat kebakaran;
- (9) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan penanganan kebakaran bahan berbahaya dan beracun dalam kabupaten;
- (10) Menyiapkan bahan dan melaksanakan investigasi kejadian kebakaran;
- (11) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kedaruratan;
- (12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

6. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Fungsi yang dijalankan adalah merumuskan kebijakan teknis, menyiapkan dan menyusun Peraturan Daerah.

Di samping itu pula Satpol PP dan Damkar merupakan 7 SKPD Pengampu yang tergabung dalam pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

6. Penanggulangan Bencana

7. Sosial

Dalam pelaksanaan tugas ini terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

1. Masih terjadinya gangguan ketentraman dan ketertiban umum masalah tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan aparat dalam berkomunikasi dengan masyarakat sehingga sering terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum
2. Masih ditemukannya penjualan minuman keras masalah tersebut disebabkan karena masih adanya/ masih memproduksi minuman keras yang di jual bebas dilingkungan masyarakat serta kurangnya komunikasi aparat dengan masyarakat sehingga sering terjadi gangguan ketentraman masyarakat
3. Belum optimalnya penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Satpol PP dan Damkar
Masalah tersebut disebabkan karena adanya perlawanan dari pihak-pihak yang merasa di rugikan sehingga muncul lah imej negatif terhadap anggota Satpol PP dan Damkar
4. Belum Optimalnya penyampaian arspirasi masyarakat
Masalah tersebut disebabkan karena masih adanya atau terlalu banyak kepentingan sehingga sering terjadi bentrok antar masyarakat yang menyebabkan demo
5. Belum optimalnya perekrutan SDM anggota Satpol PP dan Damkar
Masalah tersebut disebabkan karena belum menguasai tugas pokok dan fungsi sehingga menempatkan posisi tidak sesuai dengan latar belakang Pendidikan/ atau tidak relevan dengan tugasnya
6. Tingginya mobilitas dan mobil pemadam kebakaran yang kurang menyebabkan pemeliharaan tertunda.
Masalah tersebut disebabkan kurangnya pemeliharaan peralatan pemadam kebakaran sehingga sarana dan prasarana pemadam tidak siap dalam kondisi prima
7. Belum optimalnya mempedomani risiko yang akan muncul pada pelaksanaan kegiatan

Masalah tersebut disebabkan karena penyusunan rencana awal yang tidak cermat sehingga tujuan dari program tidak tercapai

8. Tidak tersampainya komunikasi secara baik dan benar

Masalah tersebut tidak disebabkan karena kemampuan berkomunikasi kurang sehingga terjadi tidak efektifnya komunikasi dengan pelaku usaha

9. Belum optimalnya antar tim dalam berkoordinasi

Masalah tersebut disebabkan karena koordinasi antar tim kurang sehingga PAD tidak mencapai target

10. Belum optimalnya penyelesaian terhadap kasus

Masalah tersebut disebabkan karena kurang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sehingga untuk merevisi SOP tidak terlaksana

Analisis is-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Dalam upaya memperluas dan meningkatkan pelayanan publik khususnya tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran masih menemui beberapa permasalahan/kendala yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi sinergisitas trantibum linmas Kabupaten / Kota Provinsi
2. Banyaknya kejadian kebakaran di Kabupaten sewaktu-waktu institusional
3. Kurangnya sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran
4. Kurangnya aparaturnya perlindungan masyarakat yang tanggap bencana ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kegiatan sosial
5. Kesadaran/kepatuhan masyarakat untuk tidak melanggar menurunnya tindak pelanggaran perda dan perkara
6. Kurangnya anggota Satpol PP dan damkar serta jabatan Fungsional PPNS yang bersertifikat
7. Belum optimalnya evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

8. Belum optimalnya nilai SAKIP
9. Belum Optimalnya peksanaan inovasi

7. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran

1. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pencapaian kinerja kelembagaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kelembagaan secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penunjang yang sangat terkait dengan sumber daya internal kelembagaan yaitu:

- a. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki integrasi diri yang baik;
- b. Dukungan sarana prasarana penunjang kinerja yang andal;
- c. Dukungan anggaran yang proporsional dan berbasis kinerja;
- d. Serta sistem dan mekanisme internal yang baik.

Kondisi sumber daya manusia sangatlah penting guna peningkatan terhadap keamanan dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat sampai dengan tahun ini jumlah pegawai yang ada sebanyak 201 (dua ratus satu) orang diantaranya 45 orang Pegawai Negeri Sipil dan 156 orang Pegawai Tidak Tetap terdiri dari:

1. Jumlah PNS berdasarkan Jenis Kelamin:

- 1) Laki-laki : 41 Orang
- 2) Perempuan : 4 Orang

2. Jumlah Pegawai Tidak Tetap berdasarkan Jenis Kelamin:

- 1) Laki-Laki : 141 Orang
- 2) Perempuan : 15 Orang

Tabel 1.6.1
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2024

Golongan/Kepangkatan					Jl h	Pendidikan							Jlh
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I			S2	S1	D3	D2	SLT A	SLTP	SD	
6	18	11	10		45	5	19	1	-	20	-	-	45

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

Tabel 1.6.1.1
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) / Pendidikan
Tahun 2024

Pendidikan						Jumlah
S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
12	4	-	140	-	-	156

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

Jika melihat pada penjelasan data kepegawaian tersebut diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang penting untuk diperhatikan terkait dengan harapan peningkatan pencapaian kinerja kelembagaan. Fakta atas kondisi tersebut jelas merupakan tantangan kedepannya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kelembagaan, dan hal tersebut juga terdapatnya berbagai strategi dan kebijakan serta progam dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia aparatur, sehingga dapat secara signifikan memberikan kontribusi maksimal bagi upaya peningkatan kinerja pelayanan kelembagaan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu instrumen penting penunjang kinerja organisasi dimana ketersediannya jelas merupakan peningkatan kinerja SKPD.

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Satpol PP dan Damkar tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.6.2
Daftar Inventaris Barang Tahun 2024

No.	Jenis Barang	Jumlah (Volume)	Keadaan		Ket.
			Baik	Rusak	
1.	Tanah Bangunan Kantor	400 M2	1	-	Tanah tersebut merupakan bagian dari sertifikat Kantor Bupati
2.	Station Wagon	2	2	-	Kendaraan Roda 4
3.	Micro Bus	1	1	-	Kendaraan Roda 4
4.	Mini Bus	4	4	-	Kendaraan Roda 4
5.	Truck	1	1	-	Kendaraan Roda 6
6.	Pick Up	3	3	-	Kendaraan Roda 4
7.	Sepeda Motor	16	15	1	Kendaraan Roda 2
8.	Mobil Pemadam Kebakaran	12	11	1	Kendaraan Roda 6
9.	Caravan	1	1	-	Bak Mobil Rakitan
10.	Portable Water Pump	1	1	-	
11.	Pompa Air	4	3	1	Mesin Pompa Air
12.	Jet Shooter	28	26	2	Pompa Punggung
13.	Selang Air	98	87	11	Selang Pemadam
14.	Pulaski Axe (Kapak Dua Fungsi)	8	8	-	Kapak Rescue
15.	Mesin Gerinda Tangan	1	1	-	
16.	Mesin Gergaji	7	7	-	Mesin Chain Saw Mini

17.	Mesin Cuci Kendaraan	1	1	-	
18.	Termometer Standart	1	1	-	
19.	Lemari Besi/Metal	2	2	-	
20.	Lemari Kayu	2	2	-	
21.	Rak Besi	8	8	-	
22.	Rak Kayu	4	4	-	
23.	Filing Cabinet Besi	12	12	-	
24.	Brandkas	1	1	-	
25.	CCTV - Camera Control Television System	1	-	1	
26.	Papan Visual/Papan Nama	3	3	-	Running Text, Neon Box Papan Nama, Neon Box Logo
27.	Mesin Laminating	1	-	1	
28.	Papan Pengumuman	26	26	-	Papan Himbauan/ Larangan
29.	Sirine	14	12	2	Lampu Sirine / Rotary
30.	Meja Kerja Kayu	27	25	2	
31.	Kursi Besi / Metal	2	2	-	
32.	Meja Rapat	12	3	9	
33.	Tempat Tidur Besi	8	7	1	Velbed
34.	Kasur/ Spring Bed	34	34	-	
35.	Kursi Rapat	4	3	1	
36.	Kursi Biasa	27	20	7	
37.	Sofa	3	1	2	
38.	Meubeleur lainnya	19	19	-	Lemari Pajang dan Lemari Loker Anggota
39.	Mesin Pemotong Rumput	2	1	1	
40.	Alat Pembersih Lainnya	1	-	1	Tong Sampah
41.	Lemari Es	2	2	-	

42.	A.C. Split	20	15	5	
43.	Kipas Angin	4	4	-	
44.	Treng Air/ Tandon Air	1	1	-	
45.	Rak Piring Alumunium	1	1	-	
46.	Televisi	10	6	4	
47.	Sound System	1	1	-	
48.	Megaphone	2	2	-	
49.	Camera Video	2	-	2	
50.	Tangga Aluminium	9	9	-	
51.	Handy Cam	1	-	1	
52.	Alat Pemadam / Portable	12	11	1	Apar
53.	Alat Pemadam / Portable	1	1	-	Mesin Pompa Portable
54.	Pompa Kebakaran / Portable	10	9	1	Mesin Portable / Alkon
55.	Pakaian Panas / Lengkap	31	31	-	Baju Pemadam Kebakaran Tahan Panas
56.	Topeng (Masker) Oxigen	12	11	1	Masker
57.	Alat Pembantu Kebakaran	3	-	3	Senter Pemadam
58.	Alat Pembantu Kebakaran	5	5	-	Lampu Sorot Portable
59.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	4	4	-	Konper Pistol
60.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	6	-	Alat Penangkap Ular
61.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	7	7	-	Alat Pemotong Cincin
62.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	14	14	-	Nozzle Pistol
63.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	12	10	2	Nozzle Stick
64.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	23	23	-	Ypice Connection

65.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	1	-	Breathing Apparatus
66.	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	6	6	-	Tali Carametel
67.	Meja Kerja Pejabat Esselon II	1	1	-	
68.	Meja Kerja Pejabat Esselon III	5	5	-	
69.	Kursi Kerja Pejabat Esselon II	1	1	-	
70.	Kursi Kerja Pejabat Esselon III	5	5	-	
71.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	5	5	-	
72.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	1	-	Sofa
73.	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	1	-	
74.	Peralatan Studio Audio lainnya (dst)	1	-	1	Drone
75.	Camera Electronic	3	2	1	
76.	Tripod Camera	1	1	-	
77.	Layar Film / Projector	2	1	1	
78.	Pesawat Telephone	1	1	-	
79.	Handy Talky	87	65	22	
80.	Alat Komunikasi Telephone lainnya (dst)	4	2	2	Pesawat Orari Rig
81.	Unit Tranceiver VHF Portable	1	-	1	Pesawat Orari Rig
82.	Alat Komunikasi Radio VHF lainnya (dst)	3	3	-	Antena Mobil
83.	Alat Komunikasi Radio VHF lainnya (dst)	8	8	-	Pesawat Orari Rig
84.	Antene HF/ SW Stationary	1	1	-	Antena Orari Damkar
85.	Antene VHF/ FM Stationary	1	1	-	Antena Orari Mako
86.	Genset	1	-	1	
87.	Boneka	4	4	-	Manekin

88.	Uninterrupted Power Supply (UPS)	16	8	8	
89.	Pistol	1	1	-	
90.	Alat Khusus Keamanan lainnya	17	17	-	Alat Penangkap Ular
91.	Tameng	64	64	-	
92.	P.C Unit	23	21	2	Komputer
93.	Laptop / Note Book	13	9	4	
94.	Printer	30	23	7	
95.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	4	-	
96.	External / Portable Hardisk	2	2	-	
97.	Baju Pengaman lainnya (dst)	28	24	4	Baju Penangan Lebah/ Tawon, Wabah dan Binatang lainnya
98.	Helmet	40	39	1	Alat Pelindung Kepala/ Helm Anti Api Lokal
99.	Sepatu Boot	61	61	-	Sepatu Boots Pemadam
100.	Dongkrak Mobil	8	8	-	Dongkrak Botol 20 Ton
101.	Toolkit	7	7	-	Box Perkakas Mekanik Mobil
102.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1	-	Bangunan Kantor SATPOLPPDK
103.	Gedung Pos Jaga Permanen	10	10	-	Posko Damkar
104.	Gedung Garasi / Pool Semi Permanen	1	1	-	Parkir Unit Damkar
105.	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	1	-	Tower Air
106.	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	1	-	Tempat Parkir
107.	Taman lainnya	1	1	-	Taman Kantor
108.	Sumur Artesis	1	1	-	Sumur Bor

109.	Sumur Resapan	1	1	-	Instalasi PDAM
110.	Terompet	8	7	1	Alat Musik Marching Band
111.	Mellophone	5	5	-	Alat Musik Marching Band
112.	Baritone	5	5	-	Alat Musik Marching Band
113.	Tuba	2	2	-	Alat Musik Marching Band
114.	Belira	8	8	-	Alat Musik Marching Band
115.	Bass	4	4	-	Alat Musik Marching Band
116.	Tenor	4	4	-	Alat Musik Marching Band
117.	Tongkat Mayoret	1	1	-	Alat Musik Marching Band
118.	Senar	6	6		Alat Musik Marching Band
119.	Euphonium	2	2		Alat Musik Marching Band
120.	Dongkrak Hidrolik	8	-	-	Dongkrak Botol
121.	Tool Kit Set	7	-	-	Mechanic Tool Set
122.	Sarung Tangan Anti Api	10	10	-	Sarung Tangan pemadam
123.	Rescue Tripod	7	7	-	Tripod Rescue
124.	Lemari Besi	18	18	-	Lemari Loker 2 pintu
125.	Alat Pengungkit Besi	7	7	-	Hooligan Tool
126.	Tabung Oksigen	9	9	-	Tabung Oksigen + Regulator
	Jumlah	1181	1046	119	

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian

3. Anggaran

Untuk program dan kegiatan serta anggaran Satpol PP dan Damkar pada tahun 2024 terdiri dari 3 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				9.287.639.173
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		13.499.595
	1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.499.854
	2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	4.999.741
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		7.444.456.000

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	48 orang	7.439.456.296
	4.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dok	4.999.704
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		231.990.000
	5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220 paket	231.990.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		846.660.738
	6.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	4.775.549
	7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	119.627.835

1	2		3	4	5
	8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 paket	4.782.054
	9.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	15.000.000
	10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	702.475.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.078.840
	11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	137.078.840
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		613.954.000
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau	1 unit	30.000.000

1	2	3	4	5
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit 30.000.000
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37 unit 566.954.000
	14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 unit 17.000.000
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			8.499.514.165
7.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada	8.154.879.740

1	2	3	4	5
	15.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ke tertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	12 laporan 2.496.600.000
	16.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 laporan 224.999.488
	17.	Koordinasi penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggara n katentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokume n 478.950.000

1	2		3	4	5
	18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	241.275.344
	19.	Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	171 orang	4.713.054.908
8.	Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		269.634.425
	20.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	20.000.000
	21.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan	10 laporan	99.671.853

			Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
	22.	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 laporan	149.962.572
9.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		75.000.000
	23.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3/4 Lap/Org	75.000.000
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				7.413.147.891
10.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota		Persentase tingkat waktu tanggap (respon time) kejadian kebakaran		7.413.147.891

1	2	3	4	5
	24.	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	11 Dokumen 50.000.000
	25.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan 1.191.392.082
	26.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sara dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 unit 6.171.755.809
	Jumlah			25.200.301.229

8. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

1) Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 79.10 dengan predikat "BB". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Sangat Baik"

Kemudian untuk hasil tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1.3.2
Hasil Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Perencanaan Kinerja	
	1. Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	Mempedomani renstra tahun 2024–2026 dan mempedomani laporan hasil evaluasi sakis tahun 2023
	2. Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas	Melibatkan pimpinan setiap perencanaan dan pencapaian kinerja, koreksi, saran, dan perbaikan selalu disampaikan baik oleh pimpinan maupun bidang-bidang
	3. Dalam setiap dokumen perencanaan kinerja agar dapat memperhatikan keselarasan indikator kinerja	Keselarasan pohon kinerja dengan perjanjian kinerja (PK)
2.	Pengukuran Kinerja	
	1. Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran di bahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (per triwulan)	Pelaksanaan rapat evaluasi pertriwulan selalu dilaksanakan dan langsung dipimpin oleh kepala satuan
	2. Dalam melakukan perubahan rencana, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev Pertriwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya	Pelaksanaan evaluasi kinerja dalam hal penyerapan anggaran harus berdasarkan capaian kinerja apabila tidak tercapai maka dilakukan revisi kegiatan maupun anggarannya

3.	Pelaporan Kinerja	
	1. Laporan kinerja berkala (monev per triwulan) yang disusun agar di gunakan dalam penyesuaian aktifitas dan anggran	Program dan kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan DPA tahun berjalan
	2. Laporan kinerja yang disusun agar di gunakan dalam penyesuaian perencanaan kineja yang akan dihadapi berikutnya.	Laporan kinerja berjalan menjadi pedoman dalam Menyusun kegiatan berikutnya
4.	Evaluasi Internal	
	1. Agar segera menyusun rencana aksi tidak lanjut dan menindak lanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal tahun 2023, dengan melakukan input dokumen tidak lanjut pada aplikasi sakuntala	Melakukan penginputan secara tertib pada aplikasi sakuntala
	2. Agar menyampaikna laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja pertriwulan Tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monev pada aplikasi sakuntala	Keberlanjutan hasil monev kinerja pertriwulan diinput pada aplikasi sakuntala

9. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum, Pohon Kinerja, Proses Bisnis, Tugas Fungsi, dan Struktur Organisasi, Isu Strategis Perangkat Daerah, Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran, Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya, Sistematika Penyajian

BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kerja

Bab ini menguraikan tentang Visi RPJMD, Misi RPJMD, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kinerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menguraikan tentang akuntabilitas kinerja organisasi yang terdiri dari Sasaran RPJMD, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, sedangkan untuk akuntabilitas keuangan yang terdiri dari anggaran dan realisasi APBD 2023, anggaran dan realisasi menurut sasaran dan program serta perbandingan program dan kegiatan tahun 2022 dan 2023

BAB IV Penutup

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan strategis peningkatan kerja

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja 2023
4. Cascading / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1-4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

1). Tujuan

Tujuan merupakan gambaran suatu kondisi yang akan di capai pada akhir suatu periode diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut Aman
2. Meningkatnya akuntabilitas Instansi Pemerintah

2). Sasaran

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan.

Adapun Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat di lihat pada Tabel 2.1.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.1
Tujuan dan Sasaran Satpol PP dan Damkar Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Realisasi Kinerja Tujuan / Sasaran PD		Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke-		
				Realisasi 2022	Proyeksi 2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut aman	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
		Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	100	100	15 Menit	15 Menit	15 Menit

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80.01	82	83	85
----	--	--	------------------------------	--	-------	----	----	----

Indikator Kinerja Utama akan dapat memberikan gambaran suatu ukuran keberhasilan Instansi Pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 195 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.2
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Gangguan trantibumas yang diselesaikan}}{\text{X 100\% Gangguan trantibumas yang dilaporkan}}$	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit	$\frac{\text{Kebakaran pemukiman yang ditangani}}{\text{X 15 menit Kebakaran pemukiman yang di laporkan}}$	Satpol PP dan Damkar
Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	Satpol PP dan Damkar

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian / Penetapan kinerja adalah dokumen yang berupa pernyataan komitmen serta janji dalam mencapai target kinerja tertentu. Dokumen ini merupakan suatu kesepakatan kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat pemangku kegiatan. Penetapan Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Tabel Perjanjian / Penetapan Kinerja Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN

Eselon II (KEPALA SATUAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%
2.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 menit
3.	Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82

Eselon III (SEKRETARIS)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Nilai komponen perencanaan	20.50%
2.	Meningkatnya kualitas pengukuran	Nilai komponen pengukuran	21.50%

3.	Meningkatnya kualitas pelaporan	Nilai komponen pelaporan	11.00%
4.	Meningkatnya kualitas evaluasi internal	Nilai komponen evaluasi internal	19.00%
5.	Meningkatnya kualitas layanan penunjang kinerja perangkat daerah	Nilai survei pelayanan kesekretariatan	88.92%

Eselon III (KABID PENEGAKAN PERDA)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase penanganan atas pelanggaran Perda/Perkada yang di tangani secara tuntas sesuai SOP	100%
2.	Meningkatnya kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Jumlah pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan perkada	10 Laporan
3.	Meningkatnya penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%

Eselon III (KABID KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penanganan potensi gangguan ketentraman, ketertiban umum	Persentase potensi gangguan K3 yang tertangani	100%

2.	Meningkatnya cegah dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kegiatan cegah dini gangguan ketentraman dan ketertiban umum	12 laporan
3.	Meningkatnya penindakan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan penindakan	12 laporan
4.	Terlaksananya Kerjasama dengan TNI, Polri, dan stakeholder lainnya terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan (crosscutting TNI dan Polri)	1 dokumen

Eselon III (KABID APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan Linmas	1. Persentase sumber daya manusia yang bersertifikat 2. Persentase sumber daya aparatur Satlinmas yang memiliki sertifikat pengembangan Satlinas	100% 100%
2.	Meningkatnya sumber daya manusia anggota Satpol PP dan Damar	Jumlah sumber daya manusia yang mengikuti diklat	46 orang
3.	Meningkatnya sumber daya manusia Satlinmas	Jumlah Satlinmas yang mengikuti Diklat	1 dokumen

Eselon III (PEMADAM KEBAKARAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kesiap siagaan terhadap kejadian kebakaran permukiman	Cakupan wilayah yang tertangani dengan waktu tanggap 15 menit	15 Menit
2.	Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya kebakaran	Persentase penurunan aduan/laporan masyarakat terhadap kebakaran permukiman	100%
3.	Meningkatnya SDM Pemadam Kebakaran	Persentase petugas damkar yang bersertifikat	100%
4.	Meningkatnya sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Persentase sarana dan prasarana yang memenuhi standar	100%

Eselon IV (KASUBBAG PERENCANAAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya ketaatan penyusunan dokumen	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya keselarasan dokumen perangkat daerah dengan Pemda	Persentase keselarasan sasaran perangkat daerah dengan RPJMD	100%
3.	Meningkatnya kualitas penguku ran kinerja perangkat daerah	Persentase hasil monev kinerja yang ditindaklanjuti	100%

4.	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP	Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	100%
----	---	---	------

Eselon IV (KASUBBAG KEUANGAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah	Persentase dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah yang disusun sesuai ketentraman dan tepat waktu	100%

Eselon IV (KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah	Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%
2.	Terpenuhnya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah	Persentase asset dalam kondisi baik	100%
3.	Terpenuhnya layanan administrasi umum perkantoran	Persentase layanan administrasi umum sesuai dengan SOP	100%

Eselon IV (KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Penyelidikan yang dilaksanakan	12 Laporan
		Jumlah Penyidikan yang dilaksanakan	12 Laporan
2.	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	12 Laporan
3.	Terlaksananya Kerjasama Penegakan Perda dan Perkada dengan Lembaga terkait	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	1 Dokumen

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada	Jumlah pembinaan dan penyuluhan kepatuhan pelaksanaan perda dan perkada	12 Laporan
2.	Terlaksananya Peningkatan kapasitas PPNS	Jumlah PPNS yang bersertifikat	4 Orang
3.	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan	10 Laporan

Eselon IV (KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya operasi penyakit masyarakat	Jumlah operasi yang dilaksanakan	12 Laporan
2.	Terlaksananya penertiban gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah penertiban yang dilaksanakan	12 Laporan

Eselon IV (KASI PENGAMANAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya patroli keamanan	Jumlah laporan hasil kegiatan patroli lingkungan	12 laporan
2.	Terlaksananya pengamanan aset daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan aset daerah	12 1laporan
3.	Terlaksananya pengawalan pejabat dan tamu daerah	Jumlah laporan hasil pengawalan	12 laporan
4.	Terlaksananya koordinasi dengan TNI, Polri, dan Stakeholder lainnya terkait	Jumlah laporan hasil koordinasi	1 Dokumen

Eselon IV (KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pendidikan pelatihan Satlinmas	Jumlah pendidikan pelatihan yang dilaksanakan	11 kali
2.	Tersusunnya laporan hasil pendidikan dan pelatihan Satlinmas	Jumlah laporan hasil pendidikan dan pelatihan Satlinmas	1 Dokumen

Eselon IV (KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pendidikan pelatihan yang dilaksanakan	12 kali

Eselon IV (KASI KESIAPSIAGAAN)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kerjasama pelaksanaan peningkatan pemadam kebakaran dan penyelamatan SDM	Jumlah anggota yang mengikuti diklat kerjasama dengan stakeholder	11 dokumen
2.	Tersedianya prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan	Jumlah prasarana yang standar memenuhi	18 unit

Eselon IV (KASI KEDARURATAN)

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terlaksananya kerjasama dengan stakeholder untuk edukasi pencegahan dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan	Jumlah laporan kerjasama	12 laporan
2.	Terlaksananya penanganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Jumlah laporan hasil penanganan kebakaran dan penyelamatan	12 laporan

3. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Adapun Instrument Pendukung Capaian Kinerja Satpol PP dan Damkar pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				9.287.639.173
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		13.499.595
	1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.499.854
	2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	4.999.741
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		7.444.456.000

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	48 orang	7.439.456.296
	4.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	4 dok	4.999.704
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		231.990.000
	5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220 paket	231.990.000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		846.660.738
	6.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 paket	4.775.549
	7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 paket	119.627.835

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 paket	4.782.054
	9.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	15.000.000
	10.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	702.475.000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.078.840
	11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 laporan	137.078.840
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		613.954.000

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	30.000.000
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan operasional lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37 unit	566.954.000
	14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 unit	17.000.000
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				8.499.514.165
7.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		8.154.879.740
	15.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	12 laporan	2.496.600.000

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	16.	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 laporan	224.999.488
	17.	Koordinasi penyelenggara n ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggara n ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	1 dokumen	478.950.000
	18.	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	241.275.344

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	19.	Peningkatan kapasitas SDM dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuasa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya	171 orang	4.713.054.908
8.	Kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		269.634.425
	20.	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	20.000.000
	21.	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 laporan	99.671.853

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	22.	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 laporan	149.962.572
9.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		75.000.000
	23.	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3/4 Lap/Org	75.000.000
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				7.413.147.891
10.	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota		Persentase tingkat waktu tanggap (respon time) kejadian kebakaran		7.413.147.891

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran
1	2		3	4	5
	24.	Pencegahan kebakaran dalm daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	11 Dokumen	50.000.000
	25.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 laporan	1.191.392.082
	26.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sara dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 unit	6.171.755.809
	Jumlah				25.200.301.229

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya manajemen organisasi perlu dilakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya sehingga akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program. Pengukuran kinerja meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan.

a) Pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundangan lainnya, mengembangkan sumber daya aparatur serta perlindungan kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu kesatuan Organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini mendukung pencapaian Sasaran RPD yang terkait dengan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum. Dengan mengacu pada Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025 dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan jabatan tertinggi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Eselon II yaitu Kepala Satuan dengan Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c). Dimana sasaran strategis Eselon II terdiri dari:

Tabel 3.1.1
Sasaran Startegis Perangkat Daerah (Eselon II)

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	100%
3.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	68,95	82	79.10	96,46%
Rata-Rata Pencapaian Kinerja							98,82%

1. Sasaran : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum

Terkait kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan telah dilaksanakan kegiatan patroli lingkungan dan patroli taman setiap hari kerja, kegiatan pengamanan dilaksanakan setiap ada permintaan diantaranya pengawalan Pejabat Daerah, pengamanan kegiatan pasar murah, sedangkan untuk kegiatan pengawalan dilaksanakan setiap hari, dimana melibatkan seluruh anggota Satpol PP baik PNS maupun Non PNS/Anggota.

Indikator : Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Pelanggaran yang sudah dilaporkan dan ditangani selesai 100% selanjutnya akan diberikan pembinaan dan penyuluhan terkait terhadap pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui sub kegiatan pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan, dan pengawalan.





Terkait kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yaitu meliputi kegiatan pengamanan Cipta Kondisi menjelang Pemilihan Kepala Daerah, pengamanan pada saat pemungutan suara Pilkada serta monitoring pasca hasil pemungutan suara dimana semua anggota Satpol PP dan Damkar di tugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut di setiap TPS-TPS yang ada di masing-masing Desa se-Kabupaten Tanah Laut. Sehingga kegiatan tersebut sampai pada hasil suara yang terpilih maka kegiatan dilaksanakan 100%.





Sedangkan Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massal, dilapangan telah dilaksanakan kegiatan melalui Razia Pekat (penyakit masyarakat), Razia Pengendalian dan Penertiban reklame APK, Razia Pengendalian Penindakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), serta berupa razia-razia terhadap warung-warung yang mempekerjakan anak di bawah umur, para gelandangan / gepeng yang terindikasi mengganggu ketentraman masyarakat, para pemuda yang di duga mengkonsumsi miras / obat-obatan terlarang adanya demo dan unjuk rasa yang terstruktur dan pelayanan-pelayanan insidentil lainnya. Serta menindaklanjuti laporan masyarakat dimana laporan pengaduan tersebut di selesaikan di tempat sehingga kegiatan dilaksanakan 100%.



Terkait Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi kegiatan pelatihan dan pembinaan Anggota Satlinmas yang ada di desa-desa sebanyak 11 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Pelaihari telah mengukuhkan sebanyak 46 orang anggota Linmas, Kecamatan Bajuin telah mengukuhkan sebanyak 45 orang anggota Linmas, Kecamatan Bati-bati telah mengukuhkan sebanyak 45 orang anggota Linmas, Kecamatan Takisung telah mengukuhkan sebanyak 44 orang anggota Linmas, Kecamatan Tambang Ulang telah mengukuhkan sebanyak 44 orang anggota Linmas, Kecamatan Panyipatan telah mengukuhkan sebanyak 46 orang anggota

Linmas, Kecamatan Batu Ampar telah mengukuhkan sebanyak 46 orang, Kecamatan Jorong telah mengukuhkan sebanyak 42 orang, Kecamatan Bumi Makmur telah mengukuhkan sebanyak 44 orang, Kecamatan Kurau telah mengukuhkan sebanyak 46 orang, Kecamatan Kintap telah mengukuhkan sebanyak 45 orang.



Sedangkan untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Azasi Manusia yaitu meliputi kegiatan Test Urine yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan pemberian suplemen bagi seluruh Anggota ASN maupun Non ASN. Disamping itu juga Kegiatan Latihan Korsik (Kops Musik) bagi Anggota Non ASN Satpol PP yang pelaksanaannya pada saat-saat hari besar maupun hari-hari tertentu.



Sehingga untuk tahun 2024 telah mengalami penurunan pelanggaran Perda dan Perkada. Dengan berkurangnya pelanggaran tersebut yang terjadi di masyarakat maka penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada yang telah di sosialisasikan oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Gakda) pada Satpol PP dan Damkar berhasil dan terselesaikan sesuai dengan arahan Pimpinan.





Namun demikian tetap dilaksanakan kegiatan Sosialisasi Penegakan Perda dan Perkada serta perlu ditingkatkan kembali Pengawasan atas Kepatuhan Pelaksanaan Perda dan Perkada. Dimana kegiatan tersebut sudah di anggarkan setiap tahun dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP dan Damkar sehingga kegiatan harus dilaksanakan 100%.





2. Sasaran : Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi

Untuk bangunan Pos Sektor Damkar dari tahun 2023 sampai dengan 2024 ini berjumlah 10 Unit Pos Sektor Damkar meliputi Pos Sektor Kintap, Pos Sektor Takisung, Pos Sektor Kurau, Pos Sektor Panyipatan, Pos Sektor Jorong, Pos Sektor Bati-Bati, Pos Sektor Bumi Makmur, Pos Sektor Tambang Ulang, Pos Sektor Batu Ampar, Pos Sektor Bajuin sebagai berikut:

Tabel.3.1.2
10 (sepuluh) Pos Sektor Kecamatan Yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Damkar

No	Pos Sektor	Keterangan
1.	Pos Sektor Kintap	
2.	Pos Sektor Takisung	

No	Pos Sektor	Keterangan
3.	Pos Sektor Kurau	
4.	Pos Sektor Panyipatan	
5.	Pos Sektor Jorong	
6.	Pos Sektor Bati-Bati	

No	Pos Sektor	Keterangan
7.	Pos Sektor Bumi Makmur	
8.	Pos Sektor Tambang Ulang	
9.	Pos Sektor Bajuin	
10.	Pos Sektor Batu Ampar	

Sumber : Bidang Damkar

Sedangkan untuk tahun 2025 yang akan datang di bangunkan Pos Sektor Damkarnya dan dilengkapi sarana dan prasarananya di Kecamatan Panyipatan.

Indikator : Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit

Dengan di bangunkan Pos Sektor Damkar di setiap Kecamatan tersebut untuk memudahkan masyarakat menyampaikan terkait aduan penyelamatan evakuasi dan pemadam kebakaran di antaranya jenis ular, sapi masuk ke dalam sumur, kucing, melepas cincin, pencarian korban tenggelam serta korban kebakaran.

Untuk tahun 2024 ini telah dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran I dan penyelamatan sebanyak 44 orang terdiri dari 1 orang ASN dan 43 orang PTT, yang dilaksanakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Damkar Ciracas di Taman Labirin Tambang Ulang.



Tahun 2024 jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang telah memenuhi standar kualifikasi pemadam kebakaran sebanyak 12 orang.

Pada tahun 2024 program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten / Kota. Dilihat dari jenis pelayanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran sebanyak 408 kejadian dilaporkan dan ditangani selesai sebanyak 408 tingkat kejadian. Sedangkan sesuai dengan waktu tanggap seluruh kejadian sebanyak 1.530 menit / 102 kejadian sehingga hasil respon terdapat 15 menit / kejadian.

3. Sasaran : Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah yang Akuntabel

Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk target nilai SAKIP Satpol PP dan Damkar tahun 2023 adalah sebesar 81% sedangkan capaian nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 68.95% dengan kategori baik (B). Untuk target tahun 2024 sebesar 82% sedangkan capaian nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 79.10% dengan kategori baik (BB). Sebagai perbandingan antara capaian nilai SAKIP di tahun 2023 dan tahun 2024 ada peningkatan nilai. Dengan meningkatnya capaian Nilai SAKIP pada Satpol PP dan Damkar akan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik lagi sehingga mampu mencapai nilai yang maksimal (A).

b) Analisa capaian kinerja tahun 2023 dan perbandingan kinerja tahun 2024 dengan realisasi

Dapat dilihat pada anggaran tahun 2023 sebesar Rp.15.561.313.986 yang terdiri dari 3 Program 9 Kegiatan 24 Sub Kegiatan dimana dalam pemenuhan kinerja realisasi fisiknya sudah mencapai 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp.14.320.809.084 atau 92.03.

Dibandingkan dengan tahun 2023 anggaran 2024 mengalami kenaikan secara signifikan menjadi Rp.25.200.301.229 dimana terdiri 3 Program, 10

Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan. Dalam pemenuhan kinerja realisasi fisiknya pun masih tetap mencapai 100%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp.23.563.679.057 atau 93.51% sehingga sasaran strategisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.3.1.3
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2023	15.561.313.986	14.320.809.084	92.03
2024	25.200.301.229	23.563.679.057	93.51

Tabel.3.1.4
Tabel Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

No	Program / Kegiatan		Indikator	Satuan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2		3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				9.287.639.173	8.480.011.556	91.30
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		13.499.595	11.882.800	88.02
	1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	8.499.854	7.298.800	85.87
	2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Laporan	4.999.741	4.584.000	91.68

1	2	3	4	5	6	7
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah		7.444.456.000	6.725.911.712	90.34
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	48 Orang	7.439.456.296	6.721.555.912	90.35
4	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	4 Dok	4.999.704	4.355.800	87.12
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		231.990.000	207.117.117	89.28
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220 Paket	231.990.000	207.117.117	89.28

1	2	3	4	5	6	7
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		846.660.738	815.232.883	96.28
	6. Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	4.775.849	4.477.157	93.75
	7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	119.627.835	104.747.050	87.56
	8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	4.782.054	4.381.062	91.61
	9. Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 Paket	15.000.000	14.834.000	98.89
	10. Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	702.475.000	701.627.614	99.88
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		137.078.840	108.253.575	78.97

1	2		3	4	5	6	7
	11.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Laporan	137.078.840	108.253.575	78.97
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		613.954.000	611.613.469	99.61
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30.000.000	29.994.400	99.98
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37 Unit	566.954.000	564.619.069	99.59

1	2		3	4	5	6	7
	14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.000.000	17.000.000	100
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			8.499.514.165	7.992.557.474	94.03	
7.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kab / Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		8.154.879.740	7.707.383.224	94.51
	15.	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	12 Laporan	2.496.600.00	2.431.568.315	97.40

1	2	3	4	5	6	7
	16. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 Laporan	224.999.488	224.819.000	99.92
	17. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	1 dokumen	478.950.000	292.845.000	61.14
	18. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dokumen	241.275.344	229.430.179	95.09

1	2		3	4	5	6	7
	19	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	171 orang	4.713.054.908	4.528.720.730	96.09
8.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota				269.634.425	242.424.250	98.90
	20	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	20.000.000	20.000.000	100
	21	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Walikota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10 laporan	99.671.853	98.488.250	98.81

1	2		3	4	5	6	7
	22	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP	12 Laporan	149.962.572	123.936.000	82.64
9.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		75.000.000	42.750.000	57.00
	23	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3/4 Lap/or g	75.000.000	42.750.000	57.00
III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				7.413.147.891	7.076.276.027	95.45
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran		7.413.147.891	7.076.276.027	95.45

1	2	3	4	5	6	7
	24	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggulangan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	11 Dok 50.000.000	36.380.000	72.76
	25	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 Laporan 1.191.392.082	1.164.736.027	97.76%
	26	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 unit 6.171.755.809	5.875.160.000	95.19%
		Jumlah		25.200.301.229	23.563.679.057	93.51

Walaupun mengalami kenaikan anggaran namun untuk realisasi keuangan tahun 2024 lebih meningkat di bandingkan dengan tahun 2023 sehingga untuk efisiensi sasaran strategis SKPD tahun 2024 adalah:

Tabel.3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon time 15 menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	100%
3.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	68,95	82	79.10	96,46%
Rata-Rata Pencapaian Kinerja							98,82%

Sedangkan penanganan terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang terjadi di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel.3.1.5
Data pelanggaran yang terkena dampak gangguan trantibum akibat
penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada
selama Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Data pelanggaran yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraka yaitu : - Berkas perkara sanksi Syariah : 37 kasus - Berkas perkara tipiring miras : 41 - Surat pernyataan jam operasional warung malam (tempat hiburan), mempekerja akan anak di bawah umum, pengamen hotel/kost : 40 kasus - Sanksi teguran lisan : 7 kasus	125 kasus	- Data lengkap - Data sudah selesai dengan aturan yang berlaku
	Jumlah	125 kasus	

Untuk peserta pelatihan Satlinmas yang telah dikukuhkan pada Tahun 2024 sebanyak 494 orang se-Kabupaten Tanah Laut sebagai berikut:

Tabel 3.1.6
Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan sebanyak 1.875 orang

Kecamatan	Desa	Jumlah Peserta
Pelaihari	20	46
Bajuin	9	45
Tambang Ulang	9	45

Kurau	11	46
Bumi Makmur	11	44
Bati-bati	14	45
Takisung	12	44
Panyipatan	10	46
Batu Ampar	14	46
Jorong	11	42
Kintap	14	45
Jumlah	135	494

Sumber data : Bidang Sumberdaya Aparatur

c) Analisa keberhasilan / kegagalan, hambatan dan Langkah-langkah antisipasi yang diambil

Dalam rangka keberhasilan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah :

1. Perubahan sadar Hukum di masyarakat :

Dalam jangka waktu 2024 jumlah pelanggaran terhadap Peraturan tertentu menurun menjadi 125 kasus, hal ini merupakan indikator kuat bahwa masyarakat mulai mematuhi Perda/Perkada tanpa harus terus-menerus diawasi. Kepatuhan ini muncul dari kesadaran bahwa Peraturan tersebut bukanlah hambatan, tetapi justru instrument yang memperbaiki kualitas hidup mereka.

2. Penyelesaian kasus yang tidak memihak :

Dalam konteks politik lokal, sangat mudah bagi Penegakan Perda/Perkada untuk terjebak dalam kepentingan politis. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut dalam pelayanan berupa penyelesaian suatu pelanggaran terbebas dari intervensi politik dan menjalankan prinsip keadilan yang murni sesuai dengan Pelanggaran yang dilakukan Pelanggar.

3. Peran masyarakat dalam pengawasan :

Keberhasilan yang didapat yaitu masyarakat tidak hanya patuh tetapi juga terlibat aktif dalam mengawasi pelanggaran, hal itu dapat dilihat dari aktifnya masyarakat dalam melaporkan adanya dugaan Pelanggaran Perda/Perkada di Kabupaten Tanah Laut

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah :

1. Penegakan Perda/Perkada sering kali terkendala oleh keterbatasan anggaran. Tanpa dukungan anggaran yang cukup maka akan kesulitan dalam melaksanakan tugas baik dari segi jumlah personil, fasilitas operasional maupun sarana dan prasarana pendukung.
2. Penegakan Perda/Perkada sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi antara berbagai Lembaga atau Instansi Pemerintah. Misalnya Peraturan yang melibatkan lebih dari satu sektor, sering kali tidak optimal dalam tindak lanjut dengan baik karena kurangnya informasi terkait data dukung Pelanggaran Perda/Perkada tersebut.
3. Kurangnya Sumber Daya Aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan akan Perda/Perkada tersebut

Langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi hambatan dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah :

1. Pemerintah Daerah perlu memberikan pelatihan dan Pendidikan berkelanjutan bagi aparat Satpol PP untuk memperkuat kompetensi mereka dalam Penegakan Perda/Perkada. Pelatihan ini mencakup pemahaman tentang Peraturan, teknik mediasi, penyelesaian sengketa, serta keterampilan menggunakan teknologi pengawasan.
2. Mengalokasikan anggaran yang cukup dalam anggaran daerah untuk mendukung kegiatan Penegakan Hukum termasuk dalam hal personil, pelatihan serta pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan
3. Penegakan Perda/Perkada memerlukan sarana yang cukup, seperti kendaraan operasional, Sistem IT untuk monitoring, serta alat pengawasan lainnya. Dengan sumber daya yang memadai akan lebih efektif dalam melaksanakan tugas mereka.

4. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa Lembaga atau Instansi yang memiliki kewenangan dalam Penegakan Perda/Perkada dapat bekerja sama secara harmonis. Perlu berkoordinasi dengan lintas sektor untuk menangani Pelanggaran Penegakan Perda/Perkada tersebut.
5. Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur (SDA) dalam diklat PPNS
6. Perlunya peningkatan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Perda/Perkada kepada masyarakat

Untuk permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah:

- Kurangnya edukasi dan kesadaran kepada masyarakat seperti yang mempekerjakan anak di bawah umur
- Pemerintah melalui satpolppdk perlu memberikan sosialisasti yang lebih terukur dengan jumlah gangguan yang ada.
- Banyak taman yang dipergunakan untuk pesta miras.
- Sering ditemui adanya back up dari pihak ketiga yang melegalkan kegiatan
- Tidak jarang timbul perlawanan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Sedangkan upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan cara:

- Meningkatkan patroli / razia di tempat-tempat yang diduga menjadi sumber kerawanan
- Pemerintah melalui satpolppdk perlu memberikan sosialisasti yang lebih terukur dengan jumlah gangguan yang ada.
- Pemerintah harus Me alokasikan anggaran dan koordinasi dengan skpd terkait untuk memberikan wadah untuk anak anak muda dalam kegiatan positif
- Membuka layanan online (reaksi cepat) yang gampang dan mudah diakses oleh masyarakat
- Melaksanakan sosialisasi pada setiap pertemuan, rapat, dan kegiatan lainnya

Adapun kendala setelah dilaksanakannya kegiatan Pelatihan Satlinmas pada Bidang Aparatur dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

- Untuk penganggaran yang kurang menyebabkan tidak semua anggota dapat mengikuti

- Waktu pelaksanaan dirasa terlalu singkat
- Terkadang terkendala cuaca karena kegiatannya dilaksanakan di desa
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan kegiatan

Sedangkan upaya mengatasi permasalahan tersebut dengan cara:

- Anggaran disesuaikan dengan kebutuhan SKPD
- Memberikan waktu dan ruang yang cukup sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik
- Untuk kegiatan sebaiknya dimasukkan dalam anggaran murni SKPD
- Harus menyesuaikan cuaca
- Adanya dukungan dari pimpinan terkait sarana dan prasarana

Untuk permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pemadam Kebakaran adalah:

- Masih kurangnya anggota Damkar memiliki keahlian Pemadam I
- Ketersediaan tenaga Pemadam Kebakaran yang dirasa masih kurang
- Pengisian Pos Sektor dan penunjang peralatan yang masih kurang
- Terkendalanya penyediaan sumber air disaat kemarau panjang

Sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah:

- Mengikutsertakan anggota Damkar untuk keahlian Pemadam I
- Karena adanya pemutusan hubungan kontrak terhadap salah satu anggota Damkar sehingga perlu mengaktifkan para relawan yang ada dikuatkan dengan SK Bupati Tanah Laut
- Secara bertahap sudah dialokasikan pada anggaran tahun 2024 baik penambahan alat maupun peningkatan kapasitas.
- Menambah baru potensi sumur bor yang diperkirakan cukup pada saat kemarau Panjang.

Analisis kendala setelah dilaksanakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

- Lembaga yang menyelenggarakan Diklat dianggap tidak memenuhi syarat yang dikehendaki Damkar
- BKSDA hanya resque terhadap evakuasi hewan liar

- Pengetahuan ilmu Diklat hanya sebatas evakuasi dan hewan liar sedangkan ilmu bidang pemadam nya kurang

Analisis rencana aksi setelah dilaksanakannya kegiatan Diklat Damkar adalah sebagai berikut:

- Lembaga / balai yang melaksanakan Diklat harus lebih komprehensif
- Pembelajaran lebih mengutamakan tentang pemadaman kebakaran
- Untuk tahun selanjutnya harus dianggarkan kembali, kegiatan pendidikan dan pelatihan Damkar

Upaya yang dilakukan terkait kegiatan Penanganan Pemadam Kebakaran adalah:

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral
- Melakukan sosialisasi edukasi
- Inovasi membuka layanan call center baik gangguan trantibum maupun pemadam kebakaran
- Meningkatkan peran tim respon time dalam hal penanganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan/evakuasi

Sedangkan hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

- Adanya mutasi dan promosi jabatan menyebabkan terkendalanya komunikasi dan koordinasi lintas sektoral
- Kemampuan SDM yang terlibat tidak mempunyai keahlian khusus dalam hal berkomunikasi
- Tidak maksimalnya masyarakat menggunakan media pelayanan pengaduan yang telah disediakan baik media online maupun offline

Untuk bidang Sekretariat terdiri dari 1 (satu) Sekretaris yang membawahi 3 Kasubbag yaitu Kasubbag Umum dan Kepegawaian dengan Staf PNS sebanyak 1 orang, Staf Non PNS sebanyak 4 orang, untuk Kasubbag Perencanaan dengan Staf sebanyak 2 orang non PNS, Kasubbag Keuangan dengan Staf sebanyak 2 orang PNS, 2 orang Non PNS.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan Kesekretariatan adalah:

- Adanya penyesuaian terhadap regulasi yang sering berubah
- Adanya perbedaan dalam menerapkan suatu aturan atau regulasi
- Adanya penyesuaian laporan secara bersamaan waktunya
- Saat evaluasi kadang pejabat ada yang tidak bisa hadir
- Secara keseluruhan dilakukan atas kinerja dinas

Untuk upaya yang dilakukan terkait mengatasi hambatan adalah:

- Regulasi jangan sering berubah sehingga dapat dikerjakan
- Harus di bicarakan atau sebelum memutuskan sesuatu
- Adanya pengaturan yang jelas dan pemberitahuan dengan data yang cukup
- Undangan jauh-jauh hari di sampaikan sehingga cukup waktu
- Khusus pelayanan Sekretariat dari Pimpinan dan Pengguna

2. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 2 jumlah belanja yaitu belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi ini dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN, belanja barang dan jasa, belanja barang, belanja jasa , belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas.

Sedangkan untuk Belanja Modal dipergunakan untuk membiayai belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal alat besar, belanja modal alat angkutan, belanja modal alat bengkel dan alat ukur, belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar, belanja modal alat kedokteran dan kesehatan, belanja modal komputer, belanja modal alat keselamatan kerja, belanja modal rambu-rambu, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal bangunan gedung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2.5

Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Operasi	19.002.146.686	17.670.867.798
	1. Belanja Pegawai	7.439.456.296	6.719.953.053
	2. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.614.297.149	3.373.963.884
	3. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.825.159.147	3.345.989.169
	4. Belanja Barang dan Jasa	11.562.690.390	10.950.914.745
	5. Belanja Barang	824.351.642	739.583.915
	6. Belanja Jasa	8.541.293.748	8.019.917.332
	7. Belanja Pemeliharaan	557.500.000	555.302.569
	8. Belanja Perjalanan Dinas	1.639.545.000	1.636.110.929
	Jumlah Belanja Operasi	19.002.146.686	17.670.867.798
2.	Belanja Modal	6.198.154.543	5.885.468.125.81
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.274.666.835	5.108.050.400
	2. Belanja Modal Alat Besar	370.116.918	357.685.000
	3. Belanja Modal Alat Angkutan	3.800.284.800	3.752.000.000
	4. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	56.718.505	56.700.000
	5. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	743.325.381	648.256.400
	6. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.650.000	16.425.000
	7. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.613.291	85.590.000
	8. Belanja Modal Komputer	76.404.730	66.970.000
	9. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	91.347.450	91.040.000
	10. Belanja Modal Rambu-Rambu	34.205.760	33.384.000
	11. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	923.487.708	777.417.725.81
	12. Belanja Modal Bangunan Gedung	923.487.708	777.417.725.81
	Jumlah Belanja Modal	6.198.154.543	5.885.468.125.81
3.	Jumlah Belanja	25.200.301.229	23.556.335.923.81
4.	Surplus / Defisit	25.200.301.229	23.556.335.923.81

Untuk anggaran dan realisasi APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

Tabel.3.2.6
Anggaran dan Realisasi Tahun 2024

N o	Program / Kegiatan		Indikator	Satua n	Anggaran	Realisasi	Persent ase
1	2		3	4	5	6	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota				9.287.639.1 73	8.480.011.5 56	91.30
1.	Kegiatan Perencanaan, Penggangan, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Persentase perencana an, pengangga ran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		13.499.595	11.882.800	88.02
	1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaa n perangkat daerah	5 dok	8.499.854	7.298.800	85.87
	2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 Lapor an	4.999.741	4.584.000	91.68
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase administra si keuangan perangkat daerah		7.444.456.0 00	6.725.911.7 12	90.34
	3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	48 Orang	7.439.456.2 96	6.721.555.9 12	90.35
	4.	Pelaksanaan penatausahaan	Jumlah dokumen	4 Dok	4.999.704	4.355.800	87.12

		dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	penata usahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD				
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase administrasi kepegawaian perangkat daerah		231.990.000	207.117.117	89.28
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220 Paket		231.990.000	207.117.117	89.28

1	2		3	4	5	6	7
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah		846.660.738	815.232.883	96.28
6.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7 Paket	4.775.849	4.477.157	93.75	
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan	12 Paket	119.627.835	104.747.050	87.56	

			perlengkap an kantor yang disediakan				
	8.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	4.782.054	4.381.062	91.61
	9.	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 Paket	15.000.000	14.834.000	98.89
	10	Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelengg araan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Lapor an	702.475.00 0	701.627.61 4	99.88
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Administra si Umum Perangkat Daerah		137.078.84 0	108.253.57 5	78.97
	11	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Lapor an	137.078.84 0	108.253.57 5	78.97
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan		Persentase Pemelihara an Barang Milik		613.954.00 0	611.613.46 9	99.61

	Pemerintahan Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah				

1	2		3	4	5	6	7
7.	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		8.154.879 .740	7.707.38 3.224	94.51
	12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30.000.00 0	29.994.4 00	99.98
	13.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37 Unit	566.954.0 00	564.619. 069	99.59
	14.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.000.00 0	17.000.0 00	100
II.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			8.499.51 4.165	7.992.557 .474	94.03	
	15.	Pencegahan	Jumlah	12	2.496.600	2.431.56	97.40

		gangguan ketentraman dan ke tertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan , pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Laporan	.00	8.315	

1	2	3	4	5	6	7
16	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 Laporan	224.999.488	224.819.000	99.92
17	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kab/kota	1 dokumen	478.950.000	292.845.000	61.14
18	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan	1 dokumen	241.275.344	229.430.179	95.09

			n masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum				
	19	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	Jumlah SDM Satpol dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	171 orang	4.713.054.908	4.528.720.730	96.09
8.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati / Walikota				269.634.425	242.424.250	98.90
	20	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 laporan	20.000.000	20.000.000	100
	21	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan yang	10 laporan	99.671.853	98.488.250	98.81

		Peraturan Bupati / Walikota	dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
	22	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada sesuai SOP	12 Laporan	149.962.572	123.936.000	82.64

1	2		3	4	5	6	7
9.	Pembinaan Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Persentase Penuntasan Pelanggaran Perda dan Perkada		75.000.000	42.750.000	57.00
	23	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	3/4 Lap/or g	75.000.000	42.750.000	57.00

III.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				7.413.147.891	7.076.276.027	95.45
	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahays dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota		Persentase tingkat waktu tanggap (response time rate) kejadian kebakaran		7.413.147.891	7.076.276.027	95.45
24	Pencegahan kebakaran dalm daerah kabupaten / kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan / penanggula ngan kebakaran dalam daerah kabupaten / kota setiap tahunnya	11 Dok	50.000.000	36.380.000	72.76	
25	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaa n kegiatan kesiapsiaga n petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah kabupaten / kota	12 Laporan	1.191.392.082	1.164.736.027	97.76%	

1	2		3	4	5	6	7
	26	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggula ngan kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 unit	6.171.755.809	5.875.160.000	95.19%
		Jumlah			25.200.301.229	23.563.679.057	93.51

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar **Rp. 25.200.301.229** dengan **capaian Rp.23.563.679.057** atau **93,51%** yang terdiri atas 3 program, 10 kegiatan, dan 26 sub kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan tahun 2024 tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.7
Tabel Sasaran Program Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran
Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		13.499.595

Meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan evakuasi	Tingkat waktu tanggap respon 15 menit			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	8.499.854
Meningkatnya kinerja tata Kelola perangkat daerah yang akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Evaluasi kinerja perangkat daerah	4.999.741
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.444.456.000
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.439.456.296
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		231.990.000
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	231.990.000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		846.660.738

				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4.775.849
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.627.835
				Penyediaan peralatan rumah tangga	4.782.054
				Penyediaan bahan/material	15.000.000
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	702.475.000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		137.078.840
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air	137.078.840

				dan listrik	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		613.954.000
				Penyediaa n jasa pemelihara an, biaya pemelihara an dan pajak kendaraan peroranga n dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000
				Penyediaa n jasa pemelihara an, biaya pemelihara an, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasiona l atau lapangan	566.954.000
				Pemelihara an peralatan dan mesin lainnya	17.000.000

		Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum			8.499.514.165
			Penanganan Gangguan Kententraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota		8.154.879.740
				Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli pengamanan dan pengawasan	2.496.600.000
				Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda	224.999.488

				dan Perkada melalui penertiban dan penangana n unjuk rasa dan kerusuhan massa	
				Koordinasi penyeleng garaan kententram an dan ketertiban umum serta perlindung an masyaraka t tingkat kabupaten/ kota	478.950.000
				Pemberda yaan perlindung an masyaraka t dalam rangka ketentrama n dan ketertiban umum	241.275.344.
				Peningkata n kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindung	4.713.054.9 08

				an Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bermuansa hak asasi manusia	
			Penegakan Perda Kab / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota		198.265.916
				Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	20.000.000
				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	99.671.853
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	149.962.572
			Pembinaan Penyidikan		75.000.000

			Pegawai Negeri SDipil (PPNS) Kabupaten / Kota		
			Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS		75.000.000
		Program Pencegahan, Pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun			7.413.147.891
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		7.413.147.891
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	50.000.000
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	1.191.392.082

				dalam Daerah Kabupaten /Kota	
				Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	6.171.755.809
			JUMLAH		25.200.301.229

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 – 2024

Tahun 2023 Satpol PP dan Damkar memperoleh anggaran yang dituangkan dalam DPAP-SKPD sebesar **Rp.15.561.313.986** sedangkan untuk tahun 2024 sebesar **Rp.25.200.301.229** yang terdiri dari:

3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung tahun 2023 dipergunakan untuk membiayai belanja pegawai, gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan sebesar **Rp. 6.906.555.914** dengan realisasi **Rp.5.997.032.349** atau **86,83%**

Sedangkan untuk tahun 2024 belanja tidak langsung sebesar **Rp.7.439.456.296** dengan realisasi **Rp.6.719.953.053** atau **90,32%**

3.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung tahun 2023 untuk membiayai belanja barang dan jasa, belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjenanan dinas serta belanja modal sebesar **Rp.8.654.758.072** dengan realisasi **Rp.8.323.776.735** atau **96.17%** terdiri dari 3 program, 9 kegiatan, 22 sub

kegiatan. Sedangkan untuk tahun 2024 belanja langsung sebesar Rp.17.760.844.933 dengan realisasi Rp.16.843.726.004 atau 94.83%

Tabel 3.2.8
Perbandingan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2023-2024

No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2023				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.403.262.549	3.036.655.705	89.22
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.503.293.365	2.960.376.644	84.50
3.	Belanja Langsung	8.654.758.072	8.323.776.735	86.83
	Total	15.561.313.986	14.320.809.084	92.03
	Jumlah Program	3		
	Jumlah Kegiatan	9		
	Jumlah Sub Kegiatan	24		
No	Uraian	Anggaran	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
2024				
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	3.614.297.149	3.373.963.884	93.35
2.	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	3.825.159.147	3.345.989.169	87.47
3.	Belanja Langsung	17.760.844.933	16.836.382.870	94.79
	Total	25.200.301.299	23.556.335.923	93.47
	Jumlah Program	3		
	Jumlah Kegiatan	10		
	Jumlah Sub Kegiatan	26		

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan Kinerja (LKj) ini.

Satpol PP dan Damkar telah melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan DPAP-SKPD Tahun Anggaran 2024 dengan total anggaran sebesar **Rp. 25.200.301.229 dengan realisasi Rp.23.563.679.057 atau 93,51%** yang terdiri atas 3 Program, 10 Kegiatan dan 26 Sub Kegiatan. Secara keseluruhan realisasi keuangan atas pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di realisasikan.

Secara umum pencapaian kinerja sasaran dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun terdapat indikator sasaran strategis yang tidak tercapai. Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang terdiri atas 3 (satu) sasaran IKU dengan 3 (tiga) indikator dan 10 (sepuluh) sasaran program dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dengan capaian kinerja 100%.

B. Strategi Peningkatan Kerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2024 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan Diklat yang sesuai dengan tupoksinya;
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana untuk penunjang pelayanan publik;

3. Mengoptimalkan koordinasi pemangku kepentingan sebagai informasi penting bagi perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
4. Rutin melaksanakan evaluasi berkala (monev) atas hasil kegiatan
5. Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja utama (IKU) dan sasaran strategis.
6. Memahami dan menerapkan SOP yang berlaku

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.



Pelaihari, 14 Maret 2025
Kepala Satuan

MUH. KUSRI, SP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690315 199803 1 012

**Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tahun 2024**

Kabupaten	: Tanah Laut
Nama SKPD	: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tugas	: Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
Fungsi	: a. Perumusan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penegakan perundang-undangan daerah, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran; d. Pelaksanaan administrasi dinas; e. Pembinaan UPT; f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum	1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Gangguan trantibumas yang diselesaikan di bagi gangguan trantibumas yang dilaporkan di kali 100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
2	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi	1	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit	Kebakaran Pemukiman yang Ditangani dibagi Kebakaran Pemukiman yang Dilaporkan di kali 100 persen	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



Terwujudnya Kabupaten Tanah Laut aman

Persentase Penurunan Tingkat Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum

Meningkatnya ketertarikan, ketertiban umum
Persentase penyelesaian gangguan ketertarikan dan ketertiban umum

Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi
Indikator Kinerja Utama :
Tingkat Waktu Tanggap Respons Time 15 Menit

Meningkatnya penegakan perda dan perkada
% Penegakan atas Pelanggaran Perda/Perkada yang dilakukakan secara Tuntas Sesuai SOP

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur dan umum
Persentase Sumber Daya Manusia yang memiliki sertifikat Pengembangan Sertifikasi

Meningkatnya penanganan potensi gangguan ketertarikan, ketertiban umum
IK : % potensi gangguan K3 yang tertangani

Meningkatnya Kesiapsiagaan terhadap Kejadian Kebakaran Perumahan
IK : Capaian waktu yang tertangani dengan waktu tanggap 15 menit

Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada
Jumlah pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada

Meningkatnya Penegakan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada
IK : Persentase Perda dan Perkada yang dilakukakan

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Anggota Satpol PP dan Damkar
IK : Jumlah Sumber Daya Manusia yang mengikuti diblat

Meningkatnya Sumber Daya Manusia Sertifikasi
IK : Jumlah Sertifikasi yang mengikuti diblat

Meningkatnya cegah dini terhadap gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
IK : Jumlah kegiatan cegah dini gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum

Meningkatnya penindakan gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
Jumlah kasus gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum yang dilakukan penindakan

Terlaksananya kerjasama dengan TNI, POLRI, dan stakeholder lainnya terkait gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan
PROMOTOR TMS & POLRI

Meningkatnya kesadaran terhadap bahaya kebakaran
IK : % Persentase aduan/laporan masyarakat terhadap kebakaran perumahan

Meningkatnya SDM Pemadam Kebakaran
IK : % Penguasaan Damkar yang bersertifikasi

Meningkatnya Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran
IK : % Sarana Prasarana yang memenuhi standar

Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kepatuhan Pelaksanaan Perda dan Perkada
Jumlah pembinaan dan penyuluhan kepatuhan Pelaksanaan Perda dan Perkada

Terlaksananya penyidikan dan penyelidikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada
Jumlah penyelidikan yang dilaksanakan
Jumlah penyidikan yang dilaksanakan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
Jumlah pendidikan pelatihan yang dilaksanakan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Sertifikasi
Jumlah pendidikan pelatihan yang dilaksanakan

Terlaksananya patroli keamanan
IK : Jumlah laporan hasil kegiatan patroli lingkungan

Terlaksananya operasi pemadaman kebakaran
Jumlah operasi yang dilaksanakan

Terlaksananya koordinasi dengan TNI, POLRI, dan stakeholder lainnya terkait
Jumlah laporan hasil koordinasi

Terlaksananya sosialisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan
IK : jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi

Terlaksananya kerjasama pelaksanaan peningkatan SDM Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
IK : Jumlah Anggota yang mengikuti diblat kerjasama dengan stakeholder

Terlaksananya Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan
IK : Jumlah Pemadaman yang memenuhi standar

Terlaksananya peningkatan kapasitas PPS
Jumlah PPS yang bersertifikasi

Terlaksananya laporan hasil Pelaksanaan penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada
Jumlah Laporan pelaksanaan penanganan atas Pelanggaran Perda dan Perkada

Jumlah pendidikan pelatihan yang dilaksanakan

Terlaksananya laporan hasil pendidikan dan pelatihan Sertifikasi
Jumlah laporan hasil pendidikan dan pelatihan Sertifikasi

Terlaksananya pengurusan aset daerah
Jumlah laporan hasil pengurusan aset daerah

Terlaksananya penertiban gangguan Ketertarikan dan Ketertiban umum
Jumlah penertiban yang dilaksanakan

Terlaksananya laporan hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada
Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan pengawasan

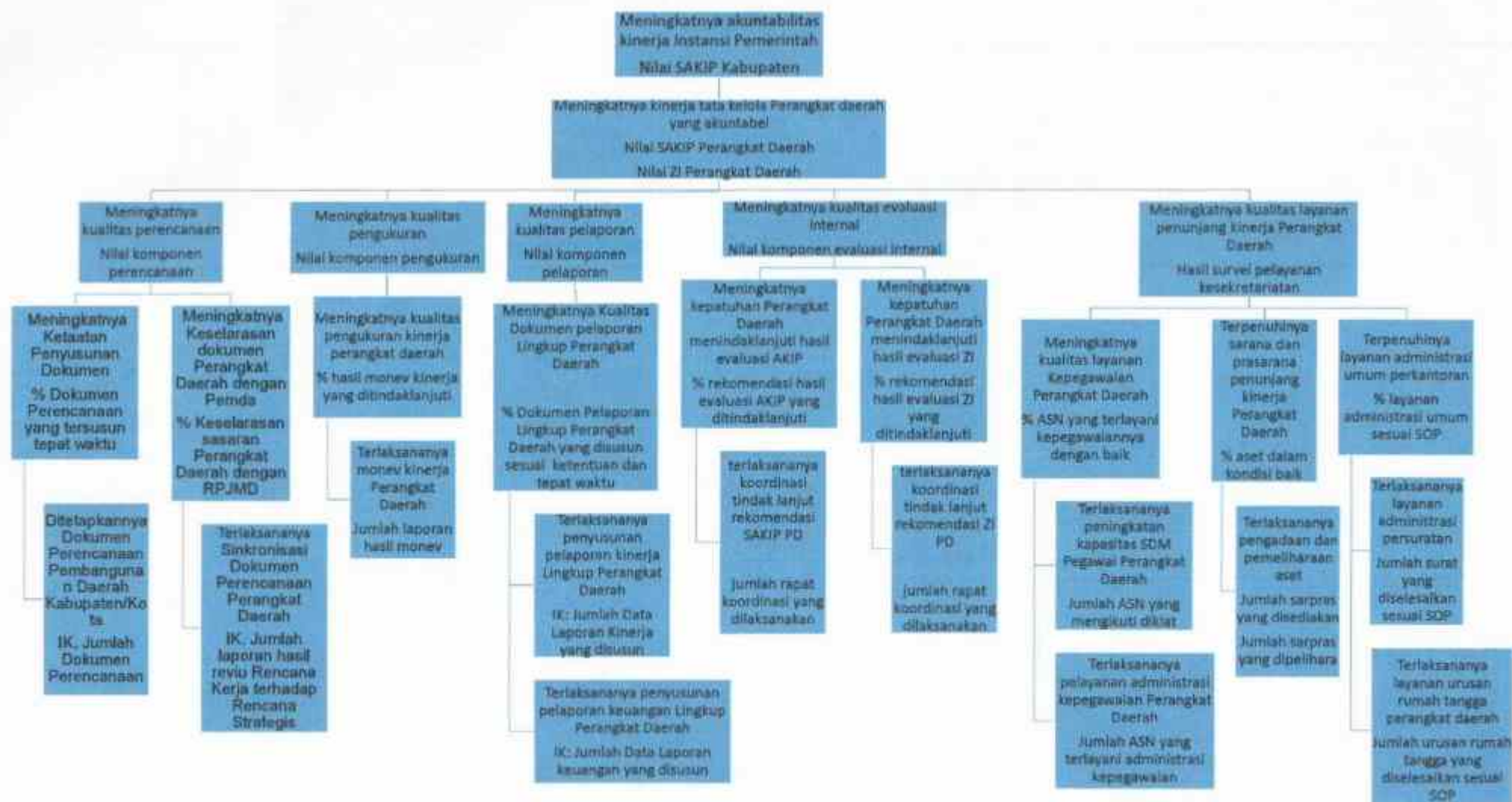
Terlaksananya kerjasama pengaduan Perda dan Perkada dengan lembaga terkait
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan

Terlaksananya kerjasama dengan stakeholder untuk edukasi pencegahan dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan
IK : Jumlah laporan kerjasama

Terlaksananya diblat Damkar Mandiri
IK : Jumlah Anggota yang mengikuti diblat Mandiri

Terlaksananya pos jaga per kecamatan
IK : Jumlah Pos Jaga yang memenuhi standar

Terlaksananya penanganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan
IK : Jumlah laporan hasil penanganan kebakaran dan penyelamatan





PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. KUSRI, SP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : SYAMSIR RAHMAN
Jabatan : PJ. BUPATI TANAH LAUT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama
KEPALA SATUAN

MUH. KUSRI, SP

NIP.19690315 199803 1 012

PRERIANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum			
	1	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100
2.	Meningkatnya Pelayanan Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Evakuasi			
	1	Tingkat Waktu Tanggap Respon Time 15 Menit	%	15 Menit
3.	Meningkatnya Kinerja Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Akuntabel			
	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.499.514.165
1.05.02.2.01 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	8.154.879.740
1.05.02.2.01.01 Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.496.600.000
1.05.03.2.01.02 Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	224.999.488
1.05.02.2.01.03 Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	478.950.000
1.05.02.2.01.04 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	241.275.344
1.05.02.2.01.05 Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.713.054.908
1.05.02.2.02 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	269.634.425
1.05.02.2.02.10 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000
1.05.02.2.02.11 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	149.962.572
1.05.02.2.02.12 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99.671.853
1.05.02.2.03 Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	75.000.000
1.05.02.2.03.01 Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	75.000.000
1.05.04 Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.413.147.891
1.05.04.2.01 Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	7.413.147.891
1.05.04.2.01.01 Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000
1.05.04.2.01.02 Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.191.392.082
1.05.04.2.01.06 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.171.755.809

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	9.287.639.173
1.05.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.499.595
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.499.854
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.741
1.05.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.444.456.000
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.439.456.296
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704
1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.990.000
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	231.990.000
1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.660.738
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.775.849
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.627.835
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga	4.782.054
1.05.01.2.06.0007 Penyediaan bahan material	15.000.000
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	702.475.000
1.05.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.078.840
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	137.078.840
1.05.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	613.954.000
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	566.954.000
1.05.01.2.09.0000 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17.000.000

Pihak Kedua
PJ. BUPATI TANAH LAUT

SYAMSIR RAHMAN

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama
KEPALA SATUAN

MUH. KUSRI, SP

NIP.19690315 199803 1 012



PRERIJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAHLIANI, S.Pt, MP
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : MUH. KUSRI, SP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 199803 2 008

PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan		
	1 Nilai Komponen Perencanaan	%	25,6
2.	Meningkatnya Kualitas Pengukuran		
	1 Nilai Komponen Pengukuran	%	23,5
3.	Meningkatnya Kualitas Pelaporan		
	1 Nilai Komponen Pelaporan	%	13
4.	Meningkatnya Kualitas Evaluasi Internal		
	1 Nilai Komponen Evaluasi Internal	%	21
5.	Meningkatnya Kualitas Layanan Penunjang Kinerja Perangkat Daerah		
	1 Nilai Survei Pelayanan Kesekretariatan	%	89,5

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	9.287.639.173
1.05.01.2.01 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.499.595
1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.499.854
1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.741
1.05.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.444.456.000
1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.439.456.296
1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704
1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	231.990.000
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	231.990.000
1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.660.738
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.775.849
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.627.835
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga	4.782.054
1.05.01.2.06.0007 Penyediaan bahan material	15.000.000
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	702.475.000
1.05.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.078.840
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	137.078.840
1.05.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	613.954.000
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	566.954.000
1.05.01.2.09.0000 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17.000.000

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 1998031 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
SEKRETARIS,

DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 199803 2 008



**PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WANDA ARISANDI, ST, M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : MUH. KUSRI, SP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

WANDA ARISANDI, ST, M.T,
NIP.19761206 199803 1 001

PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Kejadian Kebakaran Pemukiman		
	1 Cakupan Wilayah yang Tertangani dengan waktu Tanggap 15 menit	%	100
2.	Meningkatnya Kesadaran Terhadap Bahaya Kebakaran		
	1 Persentase Penurunan Aduan/Laporan Masyarakat Terhadap Kebakaran Permukiman	%	100
3.	Meningkatnya SDM Pemadam Kebakaran		
	1 Persentase Petugas Damkar yang Bersertifikat	%	100
4.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran		
	1 Pesentase Sarana dan Prasarana yang Memenuhi Standar	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.04	Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	7.413.147.891
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	7.413.147.891
1.05.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000
1.05.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.191.392.082
1.05.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.171.755.809

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

WANDA ARISANDI, ST, M.T
NIP.19761206 198803 1 001



**PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MASANINOR, S.Sos**
Jabatan : **KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH**

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : **MUH. KUSRI, SP**
Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

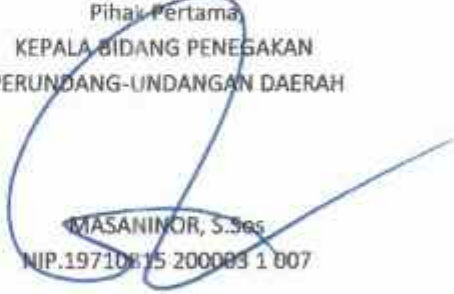
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASANINOR, S.Sos
NIP.19710815 200003 1 007

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penegakan Perda dan Perkada		
1	Persentase Penanganan atas Pelanggaran Perda/ Perkada yang ditangani Secara Tuntas Sesuai SOP	%	100
2.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada		
1	Jumlah Pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan	10
3.	Meningkatnya Penanganan Atas Pelanggaran Perda dan Perkada		
1	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100

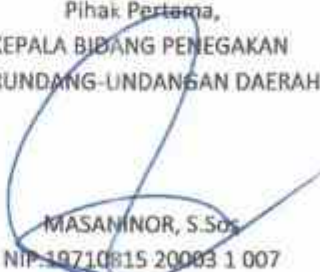
PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	344.634.425
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	269.634.425
1.05.02.2.02.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000
1.05.02.2.02.11	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	149.962.572
1.05.02.2.02.12	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99.671.853
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten / Kota	75.000.000
1.05.02.2.03.01	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	75.000.000

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASAMINOR, S.Sos
NIP.19710815 20083 1 007



**PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KAISAR MUSLIM, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : MUH. KUSRI, SP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Seiaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Penanganan Potensi Gangguan Ketentraman, Ketertiban Umum		
1	Persentase Potensi Gangguan K3 yang Tertangani	%	100
2.	Meningkatnya Cegah Dini Terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Jumlah Kegiatan Cegah Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan	12
3.	Meningkatnya Penindakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan Penindakan	Laporan	12
4.	Terlaksananya Kerjasama dengan TNI, POLRI, dan Stakeholder Lainnya Terkait Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
1	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan (CROSSCUTTING TNI dan POLRI)	Dokumen	1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.200.549.488
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	3.200.549.488
1.05.02.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.496.600.000
1.05.03.2.01.02	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	224.999.488
1.05.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten / Kota	478.950.000

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004



PRERIANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
Jabatan : KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : MUH. KUSRI, SP
Jabatan : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP.19700502 199202 1 002

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1.	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Linmas			
	1	Persentase Sumber Daya Manusia yang Bersertifikat	%	100
	2	Pesentase Sumber Daya Aparatur Satlinmas yang memiliki Sertifikat Pengembangan Satlinmas	%	100
2.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Anggota Satpol PP dan Damkar			
	1	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Diklat	Orang	46
3.	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Satlinmas			
	1	Jumlah Satlinmas yang Mengikuti Diklat	Dokumen	1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.954.330.252
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	4.954.330.252
1.05.02.2.01.04	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	241.275.344
1.05.02.2.01.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	4.713.054.908

Pihak Kedua
KEPALA SATUAN,

MUH. KUSRI, SP
NIP.19690315 199803 1 012

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP.19700502 199202 1 002



PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENNY FITRIANIE, S.Sos, M.AP
Jabatan : KASUBBAG PERENCANAAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : DAHLIANI, S.Pt, MP
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 199803 2 008

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KASUBBAG PERENCANAAN

HENNY FITRIANIE, S.Sos, M.AP
NIP.19780905 200801 2 030

PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketaatan penyusunan dokumen		
1	Persentase dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu	%	100
2.	Meningkatnya keselarasan dokumen perangkat daerah dengan Pemda		
1	Persentase keselarasan sasaran perangkat daerah dengan RPJMD	%	100
3.	Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah		
1	Persentase hasil money kinerja yang ditindaklanjuti	%	100
4.	Meningkatnya kepatuhan perangkat daerah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP		
1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	13.499.595
1.05.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.499.595
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.499.854
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.741

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 198803 2 008

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama/
KASUBBAG PERENCANAAN

HENNY FITRIANIE, S.Sos, M.AP
NIP.19780905 200801 2 030



PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LASTUTI, SP
Jabatan : KASUBBAG KEUANGAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : DAHLIANI, S.Pt, MP
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 199803 2 008

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN

LASTUTI, SP
NIP. 19741013 199603 2 002

PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah		
1	Persentase dokumen pelaporan lingkup perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

01.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	7.444.456.000
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.444.456.000
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.439.456.296
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704

Pihak Kedua
SEKRETARIS



DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 199803 2 008

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama
KASUBBAG KEUANGAN



LASTUTI, SP
NIP. 19741013 199603 2 002



PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUSI YANTI, S.AP
Jabatan : KASUBBAG UMUM DAN KEPEWAIAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : DAHLIANI, S.Pt, MP
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 199803 2 008

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KASUBBAG UMUM DAN KEPEWAIAN

SUSI YANTI, S.AP
NIP.19790926 199803 2 003

PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah		
	1 Persentase ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	%	100
2.	Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kinerja perangkat daerah		
	1 Persentase aset dalam kondisi baik	%	100
3.	Terpenuhinya layanan administrasi umum perkantoran		
	1 Persentase layanan administrasi umum sesuai SOP	%	100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
01.05.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	1.829.683.578
1.05.01.2.05 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.990.000
1.05.01.2.05.0002 Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	231.990.000
1.05.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	846.660.738
1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4.775.849
1.05.01.2.06.0002 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	119.627.835
1.05.01.2.06.0003 Penyediaan peralatan rumah tangga	4.782.054
1.05.01.2.06.0007 Penyediaan bahan material	15.000.000
1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	702.475.000
1.05.01.2.08 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	137.078.840
1.05.01.2.08.0002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	137.078.840
1.05.01.2.09 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	613.954.000
1.05.01.2.09.0001 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	30.000.000
1.05.01.2.09.0002 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	566.954.000
1.05.01.2.09.0000 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	17.000.000

Pihak Kedua
SEKRETARIS

DAHLIANI, S.Pt, MP
NIP.19690415 199803 2 008

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama
KASUBBAG UMUM DAN KEPEWAIAAN

SUSI YANTI, S.AP
NIP.19790226 199803 2 003



PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOLEHUN, S.Sos
Jabatan : KASI KESIAP SIAGAAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : WANDA ARISANDI, S.ST, M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN


WANDA ARISANDI, S.ST
NIP.19761206 199803 1 001

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI KESIAPSIAGAAN


SOLEHUN, S.Sos
NIP.19740725 199703 1 003

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya kerjasama pelaksanaan peningkatan SDM pemadam kebakaran dan penyelamatan 1 Jumlah anggota yang mengikuti diklat kerjasama dengan stakeholder	dokumen	11
2.	Tersedianya prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan 1 Jumlah prasarana yang memenuhi standar	unit	18

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.04	Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	6.221.755.809
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	6.221.755.809
1.05.04.2.01.01	Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dan Daerah Kabupaten / Kota	50.000.000
1.05.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.171.755.809

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN


WANDA ARISANDI, S.ST
NIP.19761206 199803 1 001

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama,
KASI KESIAPSIAGAAN


SOLEH UN, S.Sos
NIP.19740725 199703 1 003



PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARMAN, S.ST
Jabatan : KASI KEDARURATAN

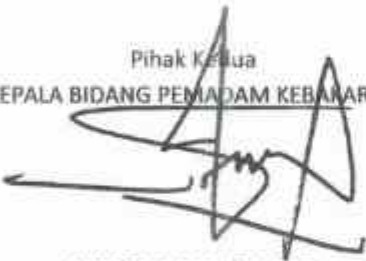
Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : WANDA ARISANDI, S.ST, M.T
Jabatan : KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN

WANDA ARISANDI, S.ST
NIP.19761206 199803 1 001

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI KEDARURATAN

ARMAN, S.ST
NIP.19730608 200701 1 017

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

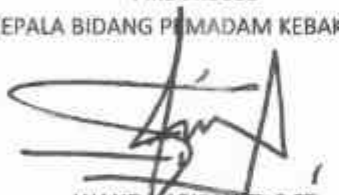
NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya kerjasama dengan stakeholder untuk edukasi pencegahan dan pengendalian kebakaran dan penyelamatan 1 Jumlah laporan kerjasama	laporan	12
2.	Terlaksananya penanganan pemadaman kebakaran dan penyelamatan 1 Jumlah laporan hasil penanganan kebakaran dan penyelamatan	laporan	12

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.04	Program Pencegahan, penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	1.191.392.082
1.05.04.2.01	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.191.392.082
1.05.04.2.01.02	Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	1.191.392.082

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PEMADAM KEBAKARAN


WANDA ARISANDI, S.ST
NIP.19761206 199803 1 001

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama,
KASI KEDARURATAN


ARMAN, S.ST
NIP.19730608 200701 1 017



PRERIANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SEPTIADI, SH
Jabatan : KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : MASANINOR, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASANINOR, S.Sos
NIP.19710815 200003 1 007

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

MUHAMMAD SEPTIADI, SH
NIP.19870901 201502 1 001

PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan kasus pelanggaran Perda dan Perkada 1 Jumlah penyelidikan yang dilaksanakan 2 Jumlah penyidikan yang dilaksanakan	laporan laporan	12 12
2.	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada 1 Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	laporan	12
3.	Terlaksananya kerjasama Penegakan Perda dan Perkada dengan lembaga terkait 1 Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	dokumen	1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ANGGARAN

149.962.572

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota

149.962.572

1.05.02.2.02.11 Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

149.962.572

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASAMINOR, S.Sos
NIP.19710615 200603 1 007

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN

MUHAMMAD SEPTIADI, SH
NIP.19870901 201502 1 001



PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMANSYAH, S.Sos
Jabatan : KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MASANINOR, S.Sos
Jabatan : KEPALA BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASANINOR, S.Sos
NIP.19718815 200003 1 007

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

RUSMANSYAH, S.Sos
NIP.19691020 199303 1 005

PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya pembinaan dan penyuluhan kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada 1 Jumlah pembinaan dan penyuluhan kepatuhan pelaksanaan Perda dan Perkada	laporan	12
2.	Terlaksananya peningkatan kapasitas PPNS 1 Jumlah PPNS yang bersertifikat	orang	4
3.	Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada 1 Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan	laporan	10

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1.05.02. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	194.671.853
1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Walikota	119.671.853
1.05.02.2.02.10 Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000
1.05.02.2.02.12 Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	99.671.853
1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	75.000.000
1.05.02.2.03.01 Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	75.000.000

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

MASANUNOR, S.Sos
NIP.19710815 200003 1 007

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN DAN PENYULUHAN

RUSMANSYAH, S.Sos
NIP.19691020 199303 1 005



PRERANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA SYAHRIAN, SE
Jabatan : KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
Jabatan : KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT


FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP.19700502 199202 1 002

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


REZA SYAHRIAN, SE
NIP.19820503 201001 1 001

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya pendidikan dan Pelatihan 1 Jumlah pendidikan pelatihan yang dilaksanakan	kali	12

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.713.054.908
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	4.713.054.908
1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak azasi manusia	4.713.054.908

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP.19700502 199202 1 002

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama,
KASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

REZA SYAHRIAN, SE
NIP.19820503 201001 1 001



PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKHMAD SYAHRUJI, SE
Jabatan : KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
Jabatan : KEPALA BIDANG APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP.19700502 199202 1 002

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

AKHMAD SYAHRUJI, SE
NIP.19731118 200604 1 009

PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tertaksananya pendidikan pelatihan Satlinmas 1 Jumlah pendidikan pelatihan yang dilaksanakan	Kali	11
2.	Tersusunnya laporan hasil pendidikan dan pelatihan Satlinmas 1 Jumlah laporan hasil pendidikan dan pelatihan Satlinmas	Dokumen	1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

ANGGARAN

241.275.344

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

241.275.344

1.05.02.2.01.04 Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum

241.275.344

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG APARATUR DAN
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

FADHILAH RAHMAN, S.KM, M.PH
NIP.19700502 199202 1 002

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

AKHMAD SYAHRUJI, SE
NIP.19731118 200604 1 009



PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RICKY WAHYU UTAMA, S.STP
Jabatan : KASI PENGAMANAN

Selanjutnya di sebut Pihak Pertama

Nama : KAISAR MUSLIM, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya di sebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PENGAMANAN


RICKY WAHYU UTAMA, S.STP
NIP.19931225 201708 1 004

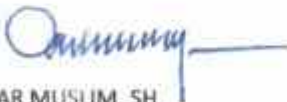
PRERJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya patroli keamanan 1 Jumlah laporan hasil kegiatan patroli lingkungan	laporan	12
2.	Terlaksananya pengamanan aset daerah 1 Jumlah laporan hasil pengamanan aset daerah	laporan	12
3.	Terlaksananya pengawalan pejabat dan tamu daerah 1 Jumlah laporan hasil pengawalan	laporan	12
4.	Terlaksananya koordinasi dengan TNI, Polri, dan Stakeholder lainnya terkait 1 Jumlah laporan hasil koordinasi	dokumen	1

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	ANGGARAN 2.975.550.000
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	2.975.550.000
1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	2.496.600.000
1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten / Kota	478.950.000

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PENGAMANAN


RICKY WAHYU UTAMA, S.STP
NIP.19931225 201708 1 004



PRERIJANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHEL H. SIMANJUNTAK, S.STP
Jabatan : KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : KAISAR MUSLIM, SH
Jabatan : KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN

RACHEL H. SIMANJUNTAK, S.STP
NIP.19950808 201708 1 002

PRERIANJIAN KINERJA
PEJABAT ESELON IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TANAH LAUT
APBD PERUBAHAN TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya operasi penyakit masyarakat 1 Jumlah operasi yang dilaksanakan	laporan	12
2.	Terlaksananya penertiban gangguan ketentraman dan ketertiban umum 1 Jumlah penertiban yang dilaksanakan	laporan	12

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

ANGGARAN

1.05.02.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	224.999.488
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	224.999.488
1.05.03.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	224.999.488

Pihak Kedua
KEPALA BIDANG KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM


KAISAR MUSLIM, SH
NIP.19671007 199803 1 004

Tanah Laut, 1 Juli 2024
Pihak Pertama,
KASI PENGENDALIAN DAN PENINDAKAN


RACHEL H. SIMANJUNTAK, S.STP
NIP.19950808 201708 1 002

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
(TRIWULAN I JANUARI S/D MARET 2024)

No.	Program/Kegiatan		Output Dim DPA	Target Kinerja		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.	
							Fisik/Kinerja		%	Keuangan				%
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.387.764.283								
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.999.685								
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	4.999.944	1	Dok	20	3.790.000	75,60	1.209.944		
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7	Laporan	4.999.741	0	Laporan	-	-	-	4.999.741		
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.738.056.000								
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	48	Orang	7.733.056.296	40	Orang	83	1.584.879.526	20,49	6.148.176.770		
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	4.999.704	2	Dok	40	1.197.500	23,95	3.802.204	Lap. Bulanan, Triwulanan, Akhir Tahun, CALK	
III	Kegiatan	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				231.990.000								
5	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220	Paket	231.990.000	0	Paket	-	-	-	231.990.000		
IV	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah				689.185.738								
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7	Paket	4.775.849	3	Paket	43	1.511.240	31,64	3.264.609		
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Paket	119.527.835	2	Paket	17	9.371.150	7,83	110.256.685		
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8	Paket	4.782.054	1	Paket	45,20	2.161.456	45,20	2.620.598		

9	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	560.000.000	3	Laporan	40,60	227.340.116	40,60	332.659.884		
V	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			137.078.840								
10	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Laporan	137.078.840	7	Laporan	19	16.417.410	11,96	120.661.430		
VI	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			581.454.000								
11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	30.000.000	1	Unit	100	7.567.500	25,23	22.432.500		
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasionals atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37 Unit	534.454.000	27	Unit	73	146.356.269	27,38	388.097.731		
13	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26 Unit	17.000.000	2	Unit	8	600.000	3,53	16.400.000		
B	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan			8.539.715.094								
VII	Kegiatan	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			8.200.080.237								
14	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman ketertiban umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	12 Laporan	2.250.000.000	3	Laporan	27,69	623.134.940	27,69	1.626.865.060		

15	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penerbitan dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masyarakat dilakukan penindakan	12	Laporan	199.999.985	3	Laporan	29	57.990.000	29,00	142.009.985		
16	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	1	Dok	478.950.000	0	Dok	-	-	-	478.950.000		
17	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat di rangka ketertarikan dan ketertiban umum	1	Dok	241.275.344	1	Dok	100	35.995.735	14,92	205.279.609		
18	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	171	Orang	5.029.654.908	163	Orang	95	1.184.194.081	23,54	3.845.660.827		
VIII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				259.634.857								
19	Sub Kegiatan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah	12	Laporan	20.000.000	3	Laporan	43,40	8.680.000	43,40	11.320.000		
20	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10	Laporan	69.672.285	2	Laporan	20	10.396.450	11,59	79.275.835		

21	Sub Kegiatan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12	Laporan	149.962.572	3	Laporan	25	11.570.000	7,72	138.392.572		
IX	Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				80.000.000								
22	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3/4	Lap/Org	80.000.000	1/1	Lap/Org	26,72	21.375.000	26,72	58.625.000		
C	Program	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				7.413.267.929								
X	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota				7.413.267.929								
23	Sub Kegiatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap tahunnya	11	Dok	50.000.000	2	Dok	18,18	8.065.000	12,13	43.935.000		
24	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kab/Kota	12	Laporan	1.191.392.082	3	Laporan	25,00	155.595.000	13,06	1.035.797.082		

25	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 Unit	6.171.875.847	0	Unit	-	1.125.600.000	18,24	5.046.275.847		
	JUMLAH			25.340.747.286			35,95	5.241.786.373	20,69	20.098.958.913		



Petahari, 28 Maret 2024

Kabupaten Tanah Laut

MUM KUSRI, SP

NIP. 19690315 199803 1 012

**LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
(TRIWULAN II JANUARI S/D JUNI 2024)**

No.	Program/Kegiatan		Output Dim DPA	Target Kinerja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi					Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.
						Fisik/Kinerja		%	Keuangan	%			
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.387.764.263								
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9.999.685								
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	4.999.944	2	Dok	75,90	3.795.000	75,90	1.204.944		
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.999.741	3	Laporan	43	700.000	14,00	4.299.741		
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.738.056.000								
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	48 Orang	7.733.056.296	45	Orang	94	3.730.177.973	48,24	4.002.878.323		
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	4.999.704	2	Dok	40	1.738.500	34,77	3.261.204	Lap. Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Akhir Tahun/CALK	
III	Kegiatan	Kepegawaian Perangkat Daerah			231.990.000								
5	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220 Paket	231.990.000	220	Paket	100	207.117.117	89,28	24.872.883		
IV	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah			689.185.738								
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7 Paket	4.775.849	4	Paket	57	2.519.240	52,75	2.256.609		
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	119.627.835	7	Paket	58	45.204.650	37,79	74.423.185		
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	4.782.054	8	Paket	100	4.381.062	91,61	400.992		

9	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	560.000.000	6	Laporan	75,96	425.389.158	75,96	134.610.842		
V	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.078.840								
10	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Laporan	137.078.840	18	Laporan	50	33.181.070	24,21	103.897.770		
VI	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				581.454.000								
11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	30.000.000	1	Unit	100	17.287.500	57,63	12.712.500		
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasionals atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37	Unit	534.454.000	33	Unit	89	281.719.762	52,71	252.734.238		
13	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	Unit	17.000.000	4	Unit	26,47	4.500.000	26,47	12.500.000		
B	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan				8.539.715.094								
VII	Kegiatan	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.200.080.237								
14	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman ketertiban umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	12	Laporan	2.250.000.000	6	Laporan	54,65	1.229.658.150	54,65	1.020.341.850		

15	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12	Laporan	199.999.985	6	Laporan	52,04	104.080.000	52,04	95.919.985		
16	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	1	Dok	478.950.000	0	Dok	-	-	-	478.950.000		
17	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dlm rangka ketertarikan dan ketertiban umum	1	Dok	241.275.344	1	Dok	100	73.275.079	30,37	168.000.265		
18	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	171	Orang	5.029.854.908	157	Orang	92	2.308.515.240	45,90	2.721.339.668	Adanya PTT yang lulus PPPK sebanyak 8 orang	
VIII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				259.634.857								
19	Sub Kegiatan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah	12	Laporan	20.000.000	6	Laporan	58,15	11.630.000	58,15	8.370.000		
20	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10	Laporan	89.872.285	8	Laporan	45,75	41.022.450	45,75	48.849.835		

21	Sub Kegiatan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12	Laporan	149.962.572	6	Laporan	50	56.195.000	37,47	93.767.572		
IX	Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				80.000.000								
22	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3/4	Lap/Org	80.000.000	1/1	Lap/Org	26,72	21.375.000	26,72	58.625.000		
C	Program	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				7.413.267.929								
X	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota				7.413.267.929								
23	Sub Kegiatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap tahunnya	11	Dok	50.000.000	6	Dok	54,55	14.905.000	29,81	35.095.000		
24	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kab/Kota	12	Laporan	1.191.392.062	6	Laporan	50,00	584.732.027	49,08	606.660.055		

25	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 Unit	6.171.875.847	8	Unit	62,03	3.828.434.600	62,03	2.343.441.247		
	JUMLAH			25.340.747.286			62,20	13.031.533.578	51,43	12.309.213.708		



LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
TRIWULAN III JANUARI S/D 30 SEPTEMBER 2024

No.	Program/Kegiatan		Output Dlm DPA	Target Kinerja	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.
						Fisik/Kinerja		%	Keuangan	%		
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			9.287.639.173				6.328.804.726			
I	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.499.595				8.432.000			
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dok	8.499.854	4	Dok	75,90	4.590.000	54,00	3.909.854	
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	4.999.741	6	Laporan	86	3.842.000	76,84	1.157.741	
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.444.456.000				4.967.651.143			
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	48 Orang	7.439.456.296	45	Orang	94	4.964.504.143	66,73	2.474.952.153	
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dok	4.999.704	3	Dok	62,94	3.147.000	62,94	1.852.704	
III	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			231.990.000				207.117.117			
5	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220 Paket	231.990.000	220	Paket	100	207.117.117	89,28	24.872.883	
IV	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah			846.660.738				627.422.877			
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7 Paket	4.775.849	4	Paket	57	2.519.240	52,75	2.256.609	
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 Paket	119.627.835	12	Paket	84,35	100.904.660	84,35	18.723.185	
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8 Paket	4.782.054	8	Paket	100	4.381.062	91,61	400.992	
9	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Material		1 Paket	15.000.000	0	Paket	-	-		15.000.000	

10	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	702.475.000	9	Laporan	77,88	519.617.925	73,97	182.857.075		
V	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.078.840				74.449.520				
11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Laporan	137.078.840	27	Laporan	75	74.449.520	54,31	62.820.320		
VI	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				813.954.000				443.732.069				
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	30.000.000	1	Unit	100	26.467.500	88,23	3.532.500		
13	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37	Unit	566.954.000	37	Unit	100	400.264.569	70,60	166.689.431		
14	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	Unit	17.000.000	26	Unit	100	17.000.000	100,00	-		
B	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.499.514.165				5.671.082.634				
VII	Kegiatan	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.154.879.740				5.499.403.184				
15	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketenteraman ketertiban umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	12	Laporan	2.496.600.000	9	Laporan	70,58	1.762.074.285	70,58	734.525.735		

16	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masyarakat yang dilakukan penindakan	12	Laporan	224.999.488	8	Laporan	72,10	162.235.000	72,10	62.764.488	
17	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	1	Dok	478.950.000	0	Dok	1,22	5.850.000	1,22	473.100.000	Pikada belum terlaksana
18	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat di lingkungan ketertarikan dan ketertiban umum	1	Dok	241.275.344	1	Dok	100	145.202.279	60,18	96.073.065	Pelatihan belum terlaksana seluruhnya dan akan dilaksanakan pada triwulan IV
19	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	171	Orang	4.713.054.908	156	Orang	81	3.424.041.640	72,65	1.289.013.268	Adanya PTT yang lulus PPPK sebanyak 6 orang
VIII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				269.634.425				150.304.450			
20	Sub Kegiatan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah	12	Laporan	20.000.000	9	Laporan	67,40	13.480.000	67,40	6.520.000	
21	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10	Laporan	99.671.853	8	Laporan	65,48	65.264.450	65,48	34.407.403	

22	Sub Kegiatan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 Laporan	149.962.572	9	Laporan	75	71.560.000	47,72	78.402.572	Pada keg. Honorarium saka bim optimal karena penyesuaian regulasi (Perda Baru sedang di proses)
IX	Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			75.000.000				21.375.000			
23	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3/4 Lap/Org	75.000.000	1/1	Lap/Org	28,50	21.375.000	28,50	53.625.000	Menunggu jadwal dr Kemendagri
C	Program	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun			7.413.147.891				5.183.094.127			
X	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota			7.413.147.891				5.183.094.127			
24	Sub Kegiatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/penanggulan an kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap tahunnya	11 Dek	50.000.000	9	Dek	81,82	23.825.000	47,65	26.175.000	
25	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kab/Kota	12 Laporan	1.191.392.082	9	Laporan	75,00	887.282.027	74,47	304.110.055	

26	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 Unit	6.171.755.809	18 Unit	100,00	4.271.987.100	69,22	1.899.768.709		
	JUMLAH				25.200.301.229		70,76	17.182.981.487	68,19	8.017.319.742		



Ref: 30 September 2024
 Kepala SATPOL PPD
 Kabupaten Tanah Laut

MUH/KUSRI, SP
 NIP. 19880315 199803 1 012

LAPORAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KAB. TANAH LAUT
TRIWULAN IV JANUARI S/D DESEMBER 2024

No.	Program/Kegiatan		Output Dim DPA	Target Kinerja		Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi				Sisa Anggaran (Rp)	Permasalahan/ Kendala	Ket.	
							Fisik/Kinerja		%	Keuangan				%
A	Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				9.287.639.173					8.480.011.556			
I	Kegiatan	Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.499.595					11.882.800			
1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dok	8.499.854	5	Dok	100	7.298.800	85,87	1.201.054	Silpa	
2	Sub Kegiatan	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Knerja Perangkat Daerah	7	Laporan	4.999.741	7	Laporan	100	4.584.000	91,68	415.741	Silpa	
II	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.444.456.000					6.725.911.712			
3	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	46	Orang	7.439.456.296	45	Orang	94	6.721.555.912	90,35	717.900.384	Silpa	
4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4	Dok	4.999.704	4	Dok	100	4.355.800	87,12	643.904	Silpa	
III	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				231.990.000					207.117.117			
5	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumish paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	220	Paket	231.990.000	220	Paket	100	207.117.117	89,26	24.872.883	Silpa	
IV	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah				846.660.738					815.232.883			
6	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	7	Paket	4.775.849	5	Paket	93,75	4.477.157	93,75	298.692	Silpa	
7	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	Paket	119.627.835	12	Paket	100	104.747.050	87,56	14.880.785	Silpa	
8	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8	Paket	4.782.054	8	Paket	100	4.381.062	91,61	400.992	Silpa	
9	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Material		1	Paket	15.000.000	1	Paket	100	14.834.000	98,89	166.000	Silpa	

10	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Laporan	702.475.000	12	Laporan	100	701.627.614	99,88	847,386	Silpa	
V	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.078.840				108.253.575				
11	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah lapotan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Laporan	137.078.840	32	Laporan	89	106.253.575	78,97	28.825.285	Silpa	
VI	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				613.954.000				611.613.469				
12	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit	30.000.000	1	Unit	100	29.994.400	99,98	5.600	Silpa	
13	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37	Unit	568.954.000	37	Unit	100	564.619.069	99,59	2.334.931	Silpa	
14	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	26	Unit	17.000.000	26	Unit	100	17.000.000	100,00	-		
B	Program	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.499.514.165				7.992.557.474				
VII	Kegiatan	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				8.154.879.740				7.707.383.224				
15	Sub Kegiatan	Pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketertiban dan ketertiban umum yang di cegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan	12	Laporan	2.496.600.000	12	Laporan	100	2.431.565.315	97,40	65.031.685		

16	Sub Kegiatan	Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masyarakat yang dilakukan penindakan	12	Laporan	224.999.488	12	Laporan	100	224.819.000	99,92	180.488	Silpa	
17	Sub Kegiatan	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kab/Kota	1	Dok	478.950.000	1	Dok	100	292.845.000	61,14	186.105.000		
18	Sub Kegiatan	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dlm rangka ketertarikan dan ketertiban umum	1	Dok	241.275.344	1	Dok	100	229.430.179	95,09	11.845.165	Silpa	
19	Sub Kegiatan	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol dan satuan perlindungan masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	171	Orang	4.713.054.908	158	Orang	96,09	4.528.720.730	96,09	184.334.178		
VIII	Kegiatan	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				269.634.425				242.424.250				
20	Sub Kegiatan	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah	12	Laporan	20.000.000	12	Laporan	100	20.000.000	100,00	-	Silpa	
21	Sub Kegiatan	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	10	Laporan	99.671.853	10	Laporan	100	98.488.250	98,81	1.183.603	Silpa	

22	Sub Kegiatan	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12	Laporan	149.962.572	12	Laporan	100	123.936.000	82,64	25.026.572	Pada keg. Honorarium saksi bim optimal karena penyesuaian regulasi (Perda Baru sedang di proses)
IX	Kegiatan	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				75.000.000				42.750.000			
23	Sub Kegiatan	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda	3/4	Lap/Org	75.000.000	2/2	Lap/Org	57	42.750.000	57,00	32.250.000	Belum ada pemanggilan dari Kepmendagri
C	Program	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun				7.413.147.891				7.076.276.027			
X	Kegiatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota				7.413.147.891				7.076.276.027			
24	Sub Kegiatan	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/pemanggulan gan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap tahunnya	11	Dok	50.000.000	11	Dok	100	36.380.000	72,76	13.620.000	Silpa
25	Sub Kegiatan	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadaman kebakaran dalam daerah Kab/Kota	12	Laporan	1.191.392.062	12	Laporan	100	1.164.736.027	97,76	26.656.055	Silpa

25	Sub Kegiatan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah sarana dan prasarana untuk pencegahan dan penanggulangan Kebakaran dan alat pelindung diri yang sah dan legal sesuai standar terkait teknis	18 Unit	8.171.755.809	18	Unit	100	5.875.160.000	95,19	286.595.809	Silpa	
	JUMLAH				25.200.301.229			97,31	23.583.679.057	93,51	1.636.622.172		



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN I
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw I		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.387.764.263,00	0,00	88,72%	8.328.425.630,00	#DIV/0!		406.408.071,00	4,33%		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.685,00	0,00	100,00%	9.999.685,00	9,00%		1.800.000,00	18,00%		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.944,00	0,00	100,00%	4.999.944,00	18,00%	0,00%	1.800.000,00	36,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.741,00	0,00	100,00%	4.999.741,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.738.056.000,00	0,00	99,95%	7.734.506.296,00	3,02%		385.206.451,00	4,98%		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.733.056.296,00	0,00	100,00%	7.733.056.296,00	3,00%	0,92%	385.006.451,00	4,98%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704,00	0,00	29,00%	1.450.000,00	40,00%	0,01%	200.000,00	4,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.990.000,00	0,00	100,00%	231.990.000,00	0,00%		0,00	0,00%		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakuan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	231.990.000,00	0,00	100,00%	231.990.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.185.738,00	0,00	25,00%	172.296.439,00	7,89%		16.854.950,00	2,45%		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.775.849,00	0,00	25,00%	1.193.963,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.627.835,00	0,00	25,00%	29.906.961,00	8,00%	0,04%	7.371.150,00	6,16%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tinggal	4.782.054,00	0,00	25,00%	1.195.515,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000,00	0,00	25,00%	140.000.000,00	8,00%	0,18%	9.483.800,00	1,69%	Tidak Ada	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!		0,00	0,00%		
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.078.840,00	0,00	25,00%	34.269.710,00	2,00%		1.946.670,00	1,42%		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.078.840,00	0,00	25,00%	34.269.710,00	2,00%	0,01%	1.946.670,00	1,42%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.454.000,00	0,00	25,00%	145.363.500,00	0,23%		600.000,00	0,10%		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	0,00	25,00%	7.500.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534.454.000,00	0,00	25,00%	133.613.500,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	0,00	25,00%	4.250.000,00	8,00%	0,01%	600.000,00	3,53%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.539.715.094,00	0,00	25,00%	2.134.928.775,00	4,06%		480.238.424,00	5,62%		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.200.080.237,00	0,00	25,00%	2.050.020.060,00	4,23%		465.903.424,00	5,68%		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	476.950.000,00	0,00	25,00%	119.737.500,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	241.275.344,00	0,00	25,00%	60.318.836,00	0,00%	0,00%	9.080.000,00	3,76%	Tidak Ada	

1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Pertindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	5.029.854.908,00	0,00	25,00%	1.257.463.727,00	3,00%	0,60%	382.988.424,00	7,61%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.250.000.000,00	0,00	25,00%	562.500.000,00	8,00%	0,71%	52.210.000,00	2,32%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	199.999.985,00	0,00	25,00%	49.999.997,00	8,00%	0,06%	21.625.000,00	10,81%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	259.634.857,00	0,00	25,00%	64.908.715,00	0,00%		14.335.000,00	5,52%		
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00	0,00	25,00%	5.000.000,00	0,00%	0,00%	2.100.000,00	10,50%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	149.962.572,00	0,00	25,00%	37.490.643,00	0,00%	0,00%	5.215.000,00	3,48%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89.672.285,00	0,00	25,00%	22.418.072,00	0,00%	0,00%	7.020.000,00	7,83%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	25,00%	20.000.000,00	0,30%		0,00	0,00%		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	80.000.000,00	0,00	25,00%	20.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.413.267.929,00	0,00	25,00%	1.853.316.986,00	1,35%		8.885.000,00	0,12%		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.413.267.929,00	0,00	25,00%	1.853.316.986,00	1,35%		8.885.000,00	0,12%		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	25,00%	12.500.000,00	9,00%	0,02%	3.545.000,00	7,09%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.191.392.082,00	0,00	25,00%	297.848.022,00	8,00%	0,38%	5.340.000,00	0,45%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.171.875.847,00	0,00	25,00%	1.542.968.964,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
		25.340.747.286	0	48,60%	12.316.671.391		2,92%	895.531.495	3,53%		



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN II
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.387.764.263,00	0,00	50,00%	4.693.782.139,00	30,45%		4.757.711.032,00	50,68%		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.685,00	0,00	50,00%	4.999.842,00	20,00%		4.495.000,00	44,95%		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.944,00	0,00	50,00%	2.499.972,00	20,00%	0,00%	3.795.000,00	75,90%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.741,00	0,00	50,00%	2.499.870,00	20,00%	0,00%	700.000,00	14,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.738.056.000,00	0,00	50,00%	3.868.928.005,00	25,01%		3.731.916.473,00	48,23%		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.733.056.296,00	0,00	50,00%	3.866.528.148,00	25,00%	7,63%	3.730.177.973,00	46,24%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704,00	0,00	48,00%	2.399.857,00	40,00%	0,01%	1.738.500,00	34,77%	Tidak Ada	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.990.000,00	0,00	50,00%	115.995.000,00	100,00%		207.117.117,00	89,28%		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakain Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	231.990.000,00	0,00	50,00%	115.995.000,00	100,00%	0,92%	207.117.117,00	89,28%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.185.738,00	0,00	50,00%	344.592.872,00	46,33%		477.494.110,00	69,28%		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.775.849,00	0,00	50,00%	2.387.925,00	57,00%	0,01%	2.519.240,00	52,75%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.627.835,00	0,00	50,00%	59.813.919,00	50,00%	0,24%	45.204.650,00	37,79%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.782.054,00	0,00	50,00%	2.391.028,00	100,00%	0,02%	4.381.062,00	91,61%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000,00	0,00	50,00%	280.000.000,00	45,00%	0,99%	425.389.158,00	75,96%	Tidak Ada	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.078.840,00	0,00	50,00%	68.539.420,00	50,00%		33.181.070,00	24,21%		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.078.840,00	0,00	50,00%	68.539.420,00	50,00%	0,27%	33.181.070,00	24,21%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.454.000,00	0,00	50,00%	290.727.000,00	51,85%		303.507.362,00	52,20%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	0,00	50,00%	15.000.000,00	100,00%	0,12%	17.287.500,00	57,63%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534.454.000,00	0,00	50,00%	267.227.000,00	50,00%	1,05%	281.719.762,00	52,71%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	0,00	50,00%	8.500.000,00	25,00%	0,02%	4.500.000,00	26,47%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.539.715.094,00	0,00	50,00%	4.269.957.548,00	74,76%		3.845.750.919,00	45,03%		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.200.080.237,00	0,00	50,00%	4.100.040.119,00	76,15%		3.715.528.469,00	45,31%		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	478.950.000,00	0,00	50,00%	239.475.000,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	241.275.344,00	0,00	50,00%	120.537.672,00	100,00%	0,95%	73.275.079,00	30,37%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	5.029.854.908,00	0,00	50,00%	2.514.927.454,00	95,00%	18,86%	2.308.515.240,00	45,90%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.250.000.000,00	0,00	50,00%	1.125.000.000,00	50,00%	4,44%	1.229.658.150,00	54,65%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	199.999.985,00	0,00	50,00%	99.999.993,00	50,00%	0,39%	104.080.000,00	52,04%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	259.634.857,00	0,00	50,00%	129.817.429,00	47,73%		108.947.450,00	41,92%		
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00	0,00	50,00%	10.000.000,00	58,00%	0,05%	11.630.000,00	58,15%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	149.962.572,00	0,00	50,00%	74.981.286,00	45,00%	0,27%	41.022.450,00	27,36%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89.672.285,00	0,00	50,00%	44.836.143,00	50,00%	0,18%	56.195.000,00	62,67%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	50,00%	40.000.000,00	20,00%		21.375.000,00	26,72%		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	80.000.000,00	0,00	50,00%	40.000.000,00	20,00%	0,06%	21.375.000,00	26,72%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw II		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.413.267.929,00	0,00	50,00%	3.706.633.967,00	33,38%		4.428.071.627,00	59,73%		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.413.267.929,00	0,00	50,00%	3.706.633.967,00	33,38%		4.428.071.627,00	59,73%		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	50,00%	25.000.000,00	54,00%	0,11%	14.995.000,00	29,81%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.191.392.082,00	0,00	50,00%	595.696.042,00	50,00%	2,35%	584.732.037,00	49,08%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.171.875.847,00	0,00	50,00%	3.085.937.925,00	30,00%	7,31%	3.826.434.600,00	62,03%	Tidak Ada	
		25.340.747.286	0	50,00%	12.670.273.654		46,24%	13.031.533.578	51,43%		

cc



LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN
Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.387.764.263,00	0,00	75,00%	7.041.153.177,00	34,87%		5.131.817.841,00	54,66%		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.685,00	0,00	75,00%	7.499.763,00	20,00%		4.495.000,00	44,95%		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.944,00	0,00	75,00%	3.749.958,00	20,00%	0,00%	3.795.000,00	75,90%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.741,00	0,00	75,00%	3.749.805,00	20,00%	0,00%	700.000,00	14,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.738.056.000,00	0,00	75,00%	5.803.871.979,00	30,01%		3.991.392.755,00	51,58%		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.733.056.296,00	0,00	75,00%	5.799.792.222,00	30,00%	9,15%	3.989.542.755,00	51,59%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704,00	0,00	81,60%	4.079.757,00	40,00%	0,01%	1.850.000,00	37,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.990.000,00	0,00	75,00%	173.992.500,00	100,00%		207.117.117,00	89,28%		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	231.990.000,00	0,00	75,00%	173.992.500,00	100,00%	0,92%	207.117.117,00	89,28%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.185.738,00	0,00	75,00%	516.889.305,00	50,40%		542.431.110,00	78,71%		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.775.849,00	0,00	75,00%	3.581.887,00	57,00%	0,01%	2.519.240,00	52,75%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.627.835,00	0,00	75,00%	89.720.877,00	50,00%	0,24%	99.404.650,00	83,09%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.782.054,00	0,00	75,00%	3.586.541,00	100,00%	0,02%	4.381.062,00	91,61%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000,00	0,00	75,00%	420.000.000,00	50,00%	1,10%	436.126.158,00	77,88%	Tidak Ada	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.078.840,00	0,00	75,00%	102.809.130,00	50,00%		47.022.090,00	34,30%		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.078.840,00	0,00	75,00%	102.809.130,00	50,00%	0,27%	47.022.090,00	34,30%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.454.000,00	0,00	75,00%	436.090.500,00	51,85%		339.359.769,00	58,36%		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	0,00	75,00%	22.500.000,00	100,00%	0,12%	20.325.000,00	67,75%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbinaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534.454.000,00	0,00	75,00%	400.840.500,00	50,00%	1,05%	313.134.769,00	58,59%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	0,00	75,00%	12.750.000,00	25,00%	0,02%	5.900.000,00	34,71%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.539.715.094,00	0,00	75,00%	6.404.786.321,00	74,85%		4.456.846.272,00	52,19%		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.200.080.237,00	0,00	75,00%	6.150.060.178,00	76,15%		4.315.008.822,00	52,62%		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	478.950.000,00	0,00	75,00%	359.212.500,00		0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	241.275.344,00	0,00	75,00%	180.956.508,00	100,00%	0,95%	89.363.379,00	37,04%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	5.029.854.908,00	0,00	75,00%	3.772.391.181,00	95,00%	18,86%	2.685.497.293,00	53,39%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0015	Precegaan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.250.000.000,00	0,00	75,00%	1.687.500.000,00	50,00%	4,44%	1.417.408.150,00	63,00%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	199.999.985,00	0,00	75,00%	149.999.989,00	50,00%	0,39%	122.740.000,00	61,37%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	259.634.857,00	0,00	75,00%	194.726.143,00	50,62%		120.462.450,00	46,40%		
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00	0,00	75,00%	15.000.000,00	58,00%	0,05%	12.480.000,00	62,40%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	149.962.572,00	0,00	75,00%	112.471.929,00	50,00%	0,30%	59.820.000,00	39,89%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89.672.285,00	0,00	75,00%	67.254.214,00	50,00%	0,18%	48.162.450,00	53,71%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	80.000.000,00	0,00	75,00%	60.000.000,00	20,00%		21.375.000,00	26,72%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw III		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
				(%)	(Rp)			Rp	%		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	80.000.000,00	0,00	75,00%	60.000.000,00	20,00%	0,06%	21.375.000,00	26,72%	Tidak Ada	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.413.267.929,00	0,00	75,00%	5.559.950.948,00	33,38%		4.802.447.627,00	64,78%		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.413.267.929,00	0,00	75,00%	5.559.950.948,00	33,38%		4.802.447.627,00	64,78%		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	0,00	75,00%	37.500.000,00	54,00%	0,11%	18.940.000,00	37,88%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.191.392.082,00	0,00	75,00%	893.544.062,00	50,00%	2,35%	688.752.027,00	57,81%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.171.875.847,00	0,00	75,00%	4.628.906.886,00	30,00%	7,31%	4.094.755.600,00	66,35%	Tidak Ada	
		25.340.747.286	0	75,00%	19.005.890.446		47,91%	14.391.111.740	56,79%		

cc



Tahun Anggaran 2024
TRIWULAN IV
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.387.764.263,00	9.287.639.173,00	100,00%	9.287.639.173,00	93,39%		6.913.681.344,00	74,44%		
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.685,00	13.499.595,00	100,00%	13.499.595,00	86,00%		8.432.000,00	62,46%		
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.944,00	8.499.854,00	100,00%	8.499.854,00	86,00%	0,03%	4.590.000,00	54,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.999.741,00	4.999.741,00	100,00%	4.999.741,00	86,00%	0,02%	3.842.000,00	76,84%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.738.056.000,00	7.444.456.000,00	100,00%	7.444.456.000,00	93,99%		5.460.573.673,00	73,35%		
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.733.056.296,00	7.439.456.296,00	100,00%	7.439.456.296,00	94,00%	27,75%	5.456.947.673,00	73,35%	Tidak Ada	
1.05.01.2.02.0003	Peaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.999.704,00	4.999.704,00	100,00%	4.999.704,00	75,00%	0,01%	3.626.000,00	72,52%	Tidak Ada	
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	231.990.000,00	231.990.000,00	100,00%	231.990.000,00	100,00%		207.117.117,00	89,28%		
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	231.990.000,00	231.990.000,00	100,00%	231.990.000,00	100,00%	0,92%	207.117.117,00	89,28%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	689.185.738,00	846.660.738,00	100,00%	846.660.738,00	84,15%		679.773.790,00	80,29%		
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.775.849,00	4.775.849,00	100,00%	4.775.849,00	57,00%	0,01%	2.519.240,00	52,75%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.627.835,00	119.627.835,00	100,00%	119.627.835,00	100,00%	0,47%	103.727.050,00	86,71%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.782.054,00	4.782.054,00	100,00%	4.782.054,00	100,00%	0,02%	4.381.062,00	91,61%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	0,00	15.000.000,00	100,00%	15.000.000,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000,00	702.475.000,00	100,00%	702.475.000,00	83,33%	2,32%	569.146.438,00	81,02%	Tidak Ada	
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00	0,00%		
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.078.840,00	137.078.840,00	100,00%	137.078.840,00	78,00%		80.009.445,00	58,37%		
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	137.078.840,00	137.078.840,00	100,00%	137.078.840,00	78,00%	0,42%	80.009.445,00	58,37%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	581.454.000,00	613.954.000,00	100,00%	613.954.000,00	100,00%		477.775.319,00	77,82%		

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	0,12%	28.906.500,00	96,36%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534.454.000,00	566.954.000,00	100,00%	566.954.000,00	100,00%	2,25%	431.868.819,00	76,17%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00%	17.000.000,00	100,00%	0,07%	17.000.000,00	100,00%	Tidak Ada	
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	Tidak Ada	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.539.715.094,00	8.499.514.165,00	100,00%	8.499.514.165,00	85,38%		6.296.675.108,00	74,08%		
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.200.080.237,00	8.154.879.740,00	100,00%	8.154.879.740,00	85,80%		6.089.310.658,00	74,67%		
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentrman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	478.950.000,00	478.950.000,00	100,00%	478.950.000,00	5,19%	0,10%	24.870.000,00	5,19%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentrman dan Ketertiban Umum	241.275.344,00	241.275.344,00	100,00%	241.275.344,00	100,00%	0,96%	174.965.579,00	72,52%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	5.029.854.908,00	4.713.054.908,00	100,00%	4.713.054.908,00	95,00%	17,77%	3.791.085.814,00	80,44%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	2.250.000.000,00	2.496.600.000,00	100,00%	2.496.600.000,00	83,00%	8,22%	1.916.864.265,00	76,78%	Tidak Ada	
1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	199.999.985,00	224.999.488,00	100,00%	224.999.488,00	80,68%	0,72%	181.525.000,00	80,68%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	259.634.857,00	269.634.425,00	100,00%	269.634.425,00	80,52%		164.614.450,00	61,05%		
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	20.000.000,00	62,00%	0,05%	13.480.000,00	67,40%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	149.962.572,00	149.962.572,00	100,00%	149.962.572,00	83,33%	0,50%	81.340.000,00	54,24%	Tidak Ada	
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	89.672.285,00	99.671.853,00	100,00%	99.671.853,00	80,00%	0,32%	69.794.450,00	70,02%	Tidak Ada	
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	80.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	57,00%		42.750.000,00	57,00%		
1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	80.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	75.000.000,00	57,00%	0,17%	42.750.000,00	57,00%	Tidak Ada	

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi				Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik (%)	Keuangan (Rp)	Fisik (%)	Fisik TTS (%)	Keuangan			
								Rp	%		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	7.413.267.929,00	7.413.147.891,00	100,00%	7.413.147.891,00	97,26%		6.531.831.127,00	88,11%		
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.413.267.929,00	7.413.147.891,00	100,00%	7.413.147.891,00	97,26%		6.531.831.127,00	88,11%		
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00%	50.000.000,00	90,91%	0,18%	29.570.000,00	59,14%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.191.392.082,00	1.191.392.082,00	100,00%	1.191.392.082,00	83,33%	3,94%	981.112.027,00	82,35%	Tidak Ada	
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	6.171.875.847,00	6.171.755.809,00	100,00%	6.171.755.809,00	100,00%	24,49%	5.521.149.100,00	89,46%	Tidak Ada	
		25.340.747.286	25.200.301.229	100,00%	25.200.301.229		91,83%	19.742.187.579	78,34%		

cc



Matrik Keselarasan Renstra 2024-2026 (di tahun 2026) dengan Renja 2026
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan SKPD
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut

No	TUJUAN		Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub		Target		Keterangan (tidak sesuai)
	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	
							Nilai SAKIP KABUPATEN	Nilai SAKIP KABUPATEN			
1.	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar			Nilai SAKIP SATPOLPPDK	Nilai SAKIP SATPOLPPDK	85	85	
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	IKM Sekretariat Satpol PP dan Damkar	IKM Sekretariat Satpol PP dan Damkar	100%	100%	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	5 dok	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	6 laporan	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	
					Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	48 org/bln	74 org/bln	
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Dokumen Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	5 dok	4 dok	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	200 pkt	

No	TUJUAN		Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub		Target		Keterangan (tidak sesuai)
	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	12 Orang	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang di sediakan	1 pkt	8 pkt	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	4 pkt	5 pkt	
					Penyediaan peralatan rumah tangga	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang di sediakan	3 pkt	1 pkt	
					Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang di sediakan	5 pkt	10 pkt	
					Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	-	
					Penyediaan Bahan/ Material	Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Bahan / material yang disediakan	Jumlah Bahan / material yang disediakan	-	2 Pkt	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	70 Laporan	12 Laporan	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang di sediakan	36 laporan	35 laporan	
					-	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	1 laporan	

No	TUJUAN		Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub		Target		Keterangan (tidak sesuai)
	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	
					-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	Jumlah SDM Satpol yang di tingkatkan kapasitasnya	-	126 laporan	
					-	-	-	Outsourcing	-	39 orang	
					-	-	-	Tenaga Ahli IT	-	2 orang	
					Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	
					Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	Pengadaan kendaraan dinas operasional / lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	-	5 Unit	
					Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	Jumlah Paket mebel yang di sediakan	-	6 Unit	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang di pelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit	1 unit	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	30 Unit	36 Unit	
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang di pelihara	31 Unit	25 Unit	
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara dan direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang di pelihara dan direhabilitasi	-	1 Unit	

No	TUJUAN		Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub		Target		Keterangan (tidak sesuai)
	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	
2.	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Pemerintah	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Satpol PP dan Damkar	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari Satpol PP dan Damkar	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pemintasan Pelanggaran Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penuntasan Pelanggaran Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100%	100%	
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kota	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 Daerah Kab/ Kota	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam 1 Daerah Kab/ Kota	100%	100%	
					Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	50 Kasus	12 Laporan	
					Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Jumlah laporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	48 Kasus	12 Laporan	
					Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat kabupaten/ kota	13 Keg	1 Dok	
					Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 dok	1 dok	
					Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satfimmus termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satfimmus termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satpol dan Satfimmus yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah pembinaan dan pengawasan aparatur SDM	173 org	201 org	

No	TUJUAN		Sasaran		Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub		Target		Keterangan (tidak sesuai)
	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	Renstra	Renja	
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota	100%	100%	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Tersedia Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, Serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	1 Unit	20 Unit	
					Pencegah kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Pencegah kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/ penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap tahunnya	Jumlah dokumen NSPM pencegahan/ penanggulangan kebakaran dalam daerah Kab/Kota setiap tahunnya	11 Dokumen	1 Dokumen	
					Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas piket dan pemadam kebakaran dalam daerah Kab/Kota	12 Laporan	12 Laporan	

Belaihari, Januari 2025
Kepala Satuan



MUL KUSRI, S.P.
Kop. 12690315 199803 1 012